No. 165 Oktober - November 2019

BaKTI News

www.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

1000 GURU UNTUK PENDIDIKAN DI PEDALAMAN SULAWESI SELATAN

KALAODI, KAMPUNG EKOLOGI PENJAGA TIDORE

MELAWAN PERSEBARAN DISINFORMASI DI INDONESIA

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X
9 771979 777057

BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA
ISSN 1979-777X
www.bakti.or.id

Penanggung Jawab M. YUSRAN LAITUPA
ZUSANNA GOSAL
Editor VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU
FADHILAH MANSYUR
Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE

Praktik Cerdas & Info Buku SUMARNI ARIANTO
Database & Sirkulasi INDINA ISBACH
Design & Layout
Editor Foto ICHSAN DJUNAED

Redaksi
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI Instagram @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews
Contributing to BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews
Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTINews Oktober - November 2019 No. **165**

1 1000 Guru untuk Pendidikan di Pedalaman Sulawesi Selatan
Oleh **APPI PATONGAI** dan **WIDYA WAHYUNI**

5 Kalaodi, Kampung Ekologi Penjaga Tidore
Oleh **EKO RUSDIANTO**

11 Kebijakan yang berpihak pada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku (Bagian 2 - Selesai)
Oleh **LUSI PEILOUW**

15 Perempuan Dalam Rantai Perdagangan Pala (Bagian 2 - Selesai)
Oleh **BERNADINUS STENI**

19 Pintu Tertutup Itu Mulai Terkuak
Oleh **SYAIFULLAH** dan **DESY MUTIALIM**

24 Melawan Persebaran Disinformasi di Indonesia
Oleh **TREVILIANA EKA PUTRI** dan **DEWA AYU DIAH ANGENDARI**

27 Magdalena Patiran Kepala Kampung Torea
Oleh **PUTUT EA.**

30 Situs Purbakala Seko Nasibmu Kini
Oleh **EKO RUSDIANTO**

33 Advokasi Dana Desa
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

38 Menuju Satu Data Penduduk Indonesia
Oleh **MUHAMMAD AMIR MA'RUF**

41 Info Buku

Foto Cover : **Adwit B. Pranowo/Yayasan BaKTI**

Kota Makale, Kabupaten Tana Toraja.
Foto: **Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI**

1000 Guru

untuk Pendidikan di Pedalaman Sulawesi Selatan

Oleh **ANDI APPI PATONGAI** dan **WIDYA WAHYUNI**

1000 Guru dibentuk pada tanggal 22 Agustus 2012 oleh Jemi Ngadiono, merupakan komunitas sosial yang peduli pendidikan anak pedalaman. Berdasarkan pengalamannya melakukan perjalanan ke daerah-daerah pelosok Indonesia, Jemi Ngadiono sering kali melihat realita pendidikan di pedalaman yang jauh berbeda dengan di kota, seperti sekolah dengan tenaga pengajar yang tidak ada, gedung sekolah yang tidak layak, fasilitas penunjang belajar mengajar tidak memadai, bahkan tingginya tingkat putus sekolah. Hal inilah yang mendorong Komunitas 1000 Guru terbentuk dengan tujuan mengajak anak muda dari seluruh Indonesia untuk ikut menyaksikan realita di pedalaman serta mengambil bagian terhadap kepedulian pada pendidikan anak Indonesia khususnya di pedalaman.

Hingga saat ini, 1000 Guru telah hadir hampir di seluruh pelosok Indonesia melalui 42 regional yang terbentuk di masing-masing provinsi. Salah satunya yaitu 1000 Guru regional Sulawesi Selatan.

Komunitas 1000 Guru terbentuk dengan tujuan mengajak anak muda dari seluruh Indonesia untuk ikut menyaksikan realita di pedalaman serta mengambil bagian terhadap kepedulian pada pendidikan anak Indonesia khususnya di pedalaman.

Komunitas 1000 Guru Sulsel merupakan regional ketiga sekaligus merupakan regional pertama di kawasan timur Indonesia. Terbentuk pada tanggal 18 Juli 2014 yang diinisiasi oleh Andi Appi Patongai dengan membawa semangat serta visi-misi yang sama dengan Jemi Ngadiono. Sebelumnya, Appi beberapa kali mengikuti kegiatan 1000 Guru di Jawa, kalimantan dan Sumatera. Berdasarkan pengalamannya itulah sehingga dia berinisiatif untuk membawa semangat komunitas ini ke Sulawesi Selatan.

Program utama komunitas ini adalah *traveling and teaching*. Program ini mengajak anak muda Indonesia dari berbagai latar belakang profesi untuk menjadi guru sehari di pedalaman sekaligus menikmati keindahan alam Indonesia. Relawan yang ikut dalam program ini diharapkan dapat berbagi inspirasi dan memberi motivasi kepada adik-adik di pedalaman Indonesia agar terus semangat bersekolah dan menggapai cita-citanya. Dengan konsep *fun teaching*, relawan 1000 Guru memperkenalkan profesi mereka dengan mendorong semangat dan menambah pengetahuan adik-adik di daerah bahwa terdapat berbagai macam profesi yang dapat dijadikan cita-cita mereka dan mereka mampu menjadi apapun dengan bersekolah. Selain itu, relawan juga akan berbagi perlengkapan sekolah kepada anak-anak pedalaman sebagai bentuk dukungan mereka terhadap anak-anak pedalaman yang tetap semangat di tengah keterbatasan mereka.

Program lainnya adalah *teaching & giving*, program ini sama halnya dengan *traveling* & *teaching* hanya saja di kegiatan ini tidak ada kegiatan *traveling* dan durasinya lebih singkat. Jika kegiatan *traveling* & *teaching* dijadwalkan selama tiga hari, kegiatan ini hanya berlangsung selama satu hari dan lokasinya pun tidak terlalu jauh dari Kota Makassar. Sejak tahun 2014, 1000 Guru Sulawesi Selatan telah melakukan 23 kegiatan *traveling and teaching* dan 4 kegiatan *teaching and giving* yang tersebar di 17 kabupaten Sulawesi Selatan. 1000 Guru Sulsel telah melibatkan lebih dari 432 orang, telah berbagi dan menginspirasi lebih dari 2300 anak di lebih dari 24 sekolah dasar yang tersebar di pelosok Sulawesi Selatan.

Selain kedua kegiatan tersebut, 1000 Guru Sulsel juga memiliki program dengan durasi yang lebih lama sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut dari kedua program sebelumnya. Program tersebut adalah, *Smart Centre*, Satu Bulan Mengabdi di Pedalaman (SBMP), Renovasi Sekolah, Pembinaan Mental Kerohanian Masyarakat Pedalaman (PMKMP), Beasiswa Guru Pedalaman (BGP) dan *Rural Women Empowerment* (RWE).

Smart Centre (SC) merupakan program yang fokus pada *Nutrition Food and Free Additional Education* untuk anak-anak pedalaman. Secara rutin selama enam bulan mereka akan mendapat sarapan bergizi sebelum proses belajar dimulai. Makanan bergizi ini disesuaikan dengan sumber daya alam mereka atau yang mudah dijangkau. Program ini melibatkan orang tua siswa dalam pengolahan dan penyajian makanan bergizi untuk anak-anak mereka yang sebelumnya telah diedukasi melalui pelatihan memasak makanan bergizi. Selain itu dalam program ini juga, relawan akan berbagi kepada anak-anak pedalaman tentang beberapa *soft skill* tambahan untuk mereka seperti bahasa Inggris, membuat prakarya, mendongeng dan menggambar.

Satu Bulan Mengabdi di Pedalaman (SBMP) merupakan program yang memberikan kesempatan kepada relawan untuk melakukan pengabdian selama satu bulan penuh di pedalaman dengan melakukan aktifitas di seluruh

aspek kehidupan masyarakat (pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan kerohanian). Program ini berdurasi enam bulan hingga satu tahun dengan pergantian relawan setiap bulannya. Sebelum relawan berangkat, terlebih dahulu mereka akan dibekali tentang gambaran lokasi kegiatan, metode pengajaran dan matriks kegiatan yang akan dilakukan selama satu bulan di lokasi.

Renovasi Sekolah merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perbaikan pada fasilitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah pedalaman agar anak-anak di pedalaman mendapatkan tempat yang nyaman untuk menuntut ilmu. Program ini melibatkan donatur perorangan dan/atau kelompok untuk bersama-sama merencanakan serta melaksanakan proses renovasi. Tahapan program dimulai dari proses *assesment*, pengurusan legalitas atau izin dari pihak terkait, perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pelaksanaan proyek serta evaluasi dan pelaporan hasil renovasi kepada seluruh donatur.

Pembinaan Mental Kerohanian Masyarakat Pedalaman (PMKMP) merupakan program yang lebih spesifik pada aktivitas kerohanian masyarakat di pedalaman. Dalam program ini akan dilibatkan pemuka agama untuk hadir dan terjun langsung ke pedalaman dan memberikan pemahaman mendalam terkait pemahaman spritual mereka. Program ini akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat secara rutin karena output dari kegiatan ini akan melahirkan kelompok remaja mesjid, pengajian, majelis taklim dan lain-lainnya. Program ini masih fokus pada daerah yang seluruh warganya beragama Islam.

Beasiswa Guru Pedalaman (BGP) merupakan bentuk dukungan kepada tenaga pengajar di pedalaman yang masih belum mendapatkan gelar sarjana sehingga menyulitkan mereka untuk menjadi tenaga pengajar profesional. Program ini akan memberikan kesempatan kepada guru pedalaman dan Lulusan Sekolah Menengah Atas untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi dan berkomitmen untuk kembali ke daerah asalnya mengabdi setelah menyelesaikan pendidikannya. Program ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan donatur yang akan terlibat.

Rural Woman Empowerment (RWE) merupakan program khusus yang dirancang untuk kaum perempuan di pedalaman. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut berperan dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. Dalam program ini mereka akan belajar tentang kecakapan dasar baca, tulis dan hitung karena umumnya di pedalaman tingkat buta huruf sangat tinggi. Setelah itu, mereka akan dibekali dengan teknik pengelolaan keuangan keluarga dan kecakapan berwirausaha dengan memaksimalkan sumber daya alam yang mereka miliki.

Berbagai aktivitas para relawan 1000 Guru di berbagai daerah terpencil di Sulawesi Selatan
Foto : **Dok. 1000 Guru Sulawesi Selatan**

Dalam melaksanakan seluruh program tersebut, 1000 Guru Sulsel menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah, para donatur dan tentunya relawan yang terlibat di setiap program. 1000 Guru terus berupaya agar dampak yang dapat diberikan kepada masyarakat pedalaman semakin besar dan semakin banyak pihak yang terlibat didalamnya baik sebagai relawan maupun sebagai donatur. Sejak tahun 2018, 1000 Guru mendaftarkan diri sebagai lembaga yang berbadan hukum dengan harapan, kedepannya program yang ada hingga saat ini semakin terarah dan berlanjut dengan sistem pembiayaan yang lebih baik. 1000 Guru Sulsel membawa semangat kerelawanan dan berkomitmen untuk mengambil bagian dalam upaya mewujudkan cita-cita kita bersama "mencerdaskan kehidupan bangsa".
We care. We Love. We Share

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program 1000 Guru Sulsel dapat menghubungi **seribuguru.sulsel@gmail.com**

"Nage dahe so jira alam, ge domaha alam yang golaha si jira se ngon"

Barang siapa yang merusak alam nanti dirinya dirusak oleh alam.

- Bobeto dari Kalaodi

KALAODI, KAMPUNG EKOLOGI PENJAGA TIDORE

Oleh **EKO RUSDIANTO**

Warga Kalaodi yang bermukim di daratan tinggi Pulau Tidore, Maluku Utara sangat tahu cara mencintai alam. Bagi mereka, merusak alam bukan hanya melukai leluhur, tapi juga membawa kesengsaraan bagi orang-orang di Kota Tidore.

Kalaodi telah ada sejak masa kepemimpinan Nuku Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Nuku. Pada tahun 1964, di masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin Syah, Kalaodi dibagi menjadi dua dusun. Statusnya berubah menjadi desa di tahun 1965 dan pada tahun 2007 Kalaodi berubah lagi menjadi kelurahan hingga sekarang.

Warga Kalaodi mengenal dua pemerintahan, ada pemerintahan negara dan ada pemangku adat yang dipimpin oleh *Suwohi*. Dalam pemerintahan negara, Kalaodi dipimpin oleh seorang Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan. Dalam adat, Kalaodi dipimpin oleh seorang *Suwohi* yang memfasilitasi para *Simo Gam* atau kepala suku.

Jumlah penduduk Kalaodi terbilang sedikit, yaitu 117 kepala keluarga atau 503 orang. Meski berpenduduk sedikit, perputaran ekonomi di Kalaodi berjalan sangat baik. Hingga sekarang, kawasan Kalaodi masih menjadi salah satu penghasil pala dan cengkih terbaik di Indonesia.

Kelurahan Kalaodi terbagi ke dalam empat lingkungan yaitu lingkungan Dola, Kola, Golili, dan Suwom. Keempat lingkungan ini terletak saling berjauhan dan dipisahkan oleh hutan

dan kebun-kebun cengkih nan hijau. Kantor kelurahan berada di Lingkungan Dola.

Pendekatan Leluhur

Kalaodi adalah salah satu kampung tertua di Pulau Tidore. Kehidupan keseharian warga Kalaodi tak dapat dipisahkan dari sejarah dan tradisi.

Dalam kehidupan sehari-hari, *Suwohi* sangat dihormati oleh warga Kalaodi karena perannya mengendalikan aktivitas yang berhubungan dengan tradisi dan ritual adat. *Suwohi* juga memastikan *Simo Gam* di masing-masing lingkungan yang menjaga kehidupan warga Kalaodi senantiasa sejalan dengan adat istiadat dan selaras dengan alam.

Struktur adat yang masih dipegang teguh oleh warga Kalaodi menjadikan mereka senantiasa mengutamakan perlindungan alam. Seluruh kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam selalu diputuskan bersama. "Bahkan untuk menebang sebatang pohon pun tetap harus dibicarakan bersama antara warga, pemangku adat, dan pemerintah," kata Abdul Riwayat Hidi, Lurah Kalaodi.

Sekitar tiga puluh tahun yang lalu, dengan mempertimbangkan penambahan jumlah penduduk dan meluasnya pemukiman di

1

2

3

4

5

6

7

8

Kalaodi, dibuatlah aturan untuk memindahkan sebagian penduduk ke Dataran Oba.

Sejak itu membangun kehidupan di tempat lain di luar Kalaodi adalah pilihan lumrah bagi para pemuda Kalaodi yang telah menyelesaikan sekolah. Adapun warga yang meneruskan hidup di Kalaodi terus mengelola hutan dan lingkungan sekitarnya mengikuti aturan adat dan tradisi yang berlaku.

Sejak masa leluhur, warga Kalaodi tahu berterima kasih kepada alam. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ritual *Paca Goya*, sebuah ritual yang diyakini memiliki kekuatan mistik yang berhubungan dengan alam.

Ritual ini bukan merupakan agenda rutin di Kalaodi. *Paca Goya* biasanya diadakan setelah panen besar dan ditentukan oleh para pemangku adat. *Paca Goya* dilakukan bila dianggap tiba masanya untuk membersihkan tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti bukit dan gunung, tempat di mana kebun dan pemukiman warga juga berada.

Seluruh warga Kalaodi dari berbagai penjuru Pulau Tidore akan datang untuk mengikuti ritual *Paca Goya*. Dalam ritual *Paca Goya*, warga menghentikan seluruh aktivitas hariannya. Ritual ini bisa berlangsung selama tiga hari penuh. "Pada puncak ritual *Paca Goya*, seluruh warga Kalaodi akan berkumpul dan makan bersama," tutur Syamsuddin Ali, Sekretaris Lurah Kalaodi.

Dalam interaksinya dengan alam semesta dan dalam kehidupan bermasyarakat, warga Kalaodi mengenal *Bobeto*. Dalam bahasa Tidore, *Bobeto* berarti sumpah turun temurun. *Bobeto* sangat dijunjung tinggi oleh warga. Warga Kalaodi meyakini, bila *Bobeto* dilanggar maka musibah akan menimpanya.

Salah satu *Bobeto* yang ditaati warga dalam mengolah alam berbunyi, *"Nage dahe so jira alam, ge domaha alam yang golaha si jira se ngon"*. Barang siapa yang merusak alam nanti dirinya dirusak oleh alam.

Bobeto ini diejawantahkan dalam beberapa aktivitas utama perlindungan alam. "Pertama yang paling dijaga adalah sumber air. Kedua, jangan sampai timbul erosi, banjir dan bencana lingkungan yang berdampak pada daerah di dataran rendah, utamanya Kota Tidore, tempat di mana istana Sultan berada," kata Syamsuddin Ali.

Berangkat dari kesetiaan menaati *Bobeto* inilah, warga Kalaodi tidak serakah dalam mengelola sumber daya alam dan berhasil menjaga pesisir Pulau Tidore dari ancaman kekeringan dan bencana lingkungan lainnya.

Pengelolaan Lahan dan Pengorganisasian Warga

Sosok *Suwohi* memiliki andil besar mengatur segala kegiatan komunal di Kalaodi dapat berjalan mulus. Jika satu kelompok sedang mengerjakan lahan di bagian utara, maka yang lainnya harus ke selatan. Kelompok kerja yang dibentuk juga beragam. Ada yang kelompok pemuda, kelompok ibu-ibu, dan kelompok lainnya sesuai dengan kepentingan pengelolaan lingkungan.

"Setiap kelompok memiliki ketua masing-masing. Hasil panen dari masing-masing kebun kelompok harus dikelola oleh lingkungan," kata Syamsuddin Ali.

Meski begitu, warga juga memiliki hak atas tanamannya masing-masing. Dalam satu areal lahan misalnya, setiap pohon punya pemiliknya. Tidak pernah ada orang yang mengambil hak orang lain. Hasil dari tanaman itu pun dikuasai penuh oleh pemilik tanaman.

---

1 Warga Kalaodi yang bermukim di daratan tinggi Pulau Tidore, Maluku Utara sangat tahu cara mencintai alam. Bagi mereka, merusak alam bukan hanya melukai leluhur, tapi juga membawa kesengsaraan bagi Tidore. 2 Struktur adat yang masih dipegang teguh oleh warga Kalaodi menjadikan mereka senantiasa mengutamakan perlindungan alam. Seluruh kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam selalu diputuskan bersama. 3&4 Sejak generasi-generasi sebelumnya, pengelolaan lahan di Kalaodi dilakukan secara komunal. Meski begitu, warga juga punya hak atas tanamannya masing-masing. Dalam satu areal lahan misalnya, setiap pohon punya pemiliknya. Tidak pernah ada orang yang mengambil hak orang lain. Hasil dari tanaman itu pun dikuasai penuh oleh pemilik tanaman. 5&6 Fuli atau bunga pala dan biji pala hasil panen, terkadang hasil penjualan dua komoditi tersebut disumbangkan masyarakat untuk keperluan umum, seperti bangun masjid atau keperluan pengelolaan sekolah, bahkan untuk kegiatan kepemudaan 7&8 Melinjo adalah hasil hutan selain pala yang dimanfaatkan warga Kalodi sebagai sumber penghasilan.

FOTO: **Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI**

Para ibu di Kalaodi bersiap menuju kebun mereka.
Foto : **Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI**

Pengelolaan keuangan hasil panen kelompok dilakukan secara terbuka. Setiap lingkungan punya strukturnya masing-masing. Ketua rukun tetangga bertindak selaku bendahara. Jika ada kebutuhan yang mendesak, maka hasil panen baik pala atau cengkih harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut.

"Biasanya untuk keperluan umum, seperti bangun masjid atau keperluan pengelolaan sekolah, bahkan untuk kegiatan kepemudaan," jelas Syamsuddin Ali.

Bila timbul riak masalah dalam kelompok kecil dan antar lingkungan, warga Kalaodi selalu membahasnya dalam pertemuan malam jumat. Musyawarah ini biasanya dirangkaikan dengan tahlilan.

Apabila ada masalah yang tidak terpecahkan dalam pertemuan malam Jumat, maka *Simo Gam* (kepala suku di satu lingkungan) akan mengajukan permasalahan tersebut ke hadapan *Suwohi*. Apapun yang nantinya diputuskan oleh Suwohi, semua pihak harus menerima tanpa boleh menentangnya.

Mengenal Perhutanan Sosial

Walaupun sejak zaman leluhur warga Kalaodi telah terbiasa menjalankan amanah untuk menjaga baik-baik hutan dan lingkungan di sekitarnya, bukan berarti mereka tidak pernah mengalami tantangan dalam mengelola sumberdaya alam.

Tahun 1982 wilayah hutan di sekitar Kalaodi termasuk pemukiman warga, ditetapkan sebagai Hutan Lindung Tagafura oleh pemerintah. Warga sempat bertanya-tanya, kenapa permukiman dan lahan-lahan kebun mereka diubah menjadi hutan lindung? Mengapa mereka tidak boleh lagi dengan bebas mengolah lahan di sana?

Masalah perubahan status lahan menjadi hutan lindung kemudian ditimpa dengan gelombang modernisasi yang melanda Kalaodi. Beberapa warga mulai mengajukan niat untuk memiliki lahan secara individu. Ini sangat bertentangan dengan praktik turun-temurun pengelolaan lahan secara komunal di Kalaodi.

Cukup lama warga Kalaodi resah akan ancaman perubahan status lahan dan cara pengelolaannya. Hingga pada tahun 2014 Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Maluku Utara hadir di Kalaodi dan mengajak warga

Berkat gerakan tanam bambu sejak tahun 2014, Kalaodi kini menjadi surganya tanaman bambu. Beragam jenis bambu tumbuh subur dan hanya bambu yang kering di batang yang boleh diambil dan diolah menjadi bahan anyaman.
Foto : **Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI**

menyiapkan sempadan selebar 15 meter untuk ditanami bambu. Rumpun bambu yang ditanam ini harus dipelihara dan bila sudah bisa dipanen, bambunya tidak boleh ditebang secara radikal.

"Kami memperkenalkan aktivitas perhutanan sosial untuk merawat cara komunal yang telah lama ada. Praktik ini sejatinya telah lama dilakukan oleh warga Kalaodi," kata Ahmad Rusydi Rasjid, Eksekutif Daerah WALHI Maluku Utara.

Berkat gerakan tanam bambu tersebut, Kalaodi kini menjadi surganya tanaman bambu. Beragam jenis bambu tumbuh di Kalaodi, mulai dari jenis bambu biasa hingga bambu kuning berbintik merah dan corak batik tumbuh subur. Warga juga tidak serta merta menebangnya. Hanya bambu yang kering di batang yang boleh diambil dan diolah menjadi bahan anyaman.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 yang membolehkan kepemilikan sertifikat tanah atas rumah juga mengikat mereka. Tanah tersebut tidak boleh dijual ke orang lain dan hanya bisa diwariskan.

Pendekatan perhutanan sosial ini dinilai sangat cocok bagi Kalaodi. Selain merehabilitasi hutan, dalam skema perhutanan sosial, warga Kalaodi dapat terus mengembangkan potensi hasil kebun dan hutan, seperti pala, cengkih, melinjo, madu, dan bambu.

"Saat ini WALHI Maluku Utara juga tengah mendampingi Kelurahan Kalaodi dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan Izin Usaha Perhutanan Sosial", tutur Yudhi. Sebelumnya, WALHI Maluku Utara telah melakukan pemetaan partisipatif bersama masyarakat.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate-Tidore Ibrahim Tuheteru mengatakan, pihaknya tengah mendorong pendekatan perhutanan sosial di Kalaodi. "Harapannya dengan skema perhutanan sosial ini, warga Kalaodi bisa merasakan manfaat hasil hutan. Sementara di sisi lain hutan yang ada tetap lestari" katanya.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas BaKTI dapat menghubungi email **info@bakti.or.id**

KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI MALUKU

(**Bagian 2** - Selesai)

Oleh **LUSI PEILOUW**

Sejak tahun 2012, Maluku telah memiliki Peraturan Daerah terkait perlindungan perempuan dan anak, yaitu Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Maluku. Kewajiban Pemerintah daerah Maluku diatur dalam Perda ini.

Idealnya, kehadiran Perda hasil perjuangan kelompok aktivis hak perempuan dan anak di Maluku ini, mesti berkontribusi pada menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Secara normatif, bangunan produk hukum di negara kita telah didirikan dengan cukup kuat, sebagai landasan bagi aparatur negara di daerah menunjukkan keberpihakan bagi mereka yang terinjak-injak hak asasinya, yakni perempuan dan anak korban kekerasan.

Kewajiban Negara Menurut Instrumen HAM

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia terikat pada kesepakatan-kesepakatan internasional. Diantaranya adalah *Convention on Elimination of the Discriminations Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan *The Convention on the Right of the Children* (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebagai negara peserta CRC, Indonesia terikat pada kewajiban hasil *(obligation of result)* yaitu kewajiban untuk menghasilkan kemajuan yang nyata dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak dan kewajiban pelaksanaan *(obligation of conduct)* yaitu kewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara terukur dan tertanggungjawab.

Kita dapat mengukur sejauh mana pemerintah Indonesia mengimplementasi CEDAW dari beberapa aspek. Misalnya, sejauh mana pemerintah mengambil langkah-langkah menyiapkan regulasi, kebijakan dan program untuk menertibkan otoritas negara di daerah untuk menghormati hak-hak perempuan, melindungi perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan dan memenuhi hak-hak korban kekerasan.

Kemajuan Terkini Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTP dan KTA)

Di tingkat nasional telah ada kemajuan berarti dalam upaya pemenuhan hak korban, dimana Komnas Perempuan, atas amanat dari BAPPENAS bersama dengan lembaga-lembaga pengadalayanan, baru saja finalisasi sebuah konsep layanan korban yang mengintegrasikan

Kemajuan terbesar adalah tersedianya Rumah Aman bagi korban, yang dikelola secara swadaya oleh CSO. Rumah Aman ini telah sangat berjasa sebagai tempat berteduh sementara waktu bagi para korban ketika rumah atau lingkungan mereka tidak aman. Tantangannya adalah bagaimana menjamin keberlanjutan dari rumah aman ini.

semua aspek secara paripurna, yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Maluku terpilih sebagai salah satu dari 5 provinsi ujicoba implementasi, dengan bermitra dengan Yayasan GASIRA.

Kemajuan penegakan hukum terlihat di Polres Pulau Ambon Pulau-pulau Lease berupa Jumlah penyidik yang sangat memadai (jumlah polisi wanita meningkat). Sebelumnya keterbatasan penyidik menjadi keluhan korban dan keluarga maupun para pendamping korban. Manajemen penanganan perkara yang tertata dengan lebih baik. Proses penanganan perkara sudah sangat cepat dan profesional. Gedung kantor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang semakin ramah korban. Serta adanya kenaikan anggaran operasional bagi UPPA, yang berdampak positif bagi profesionalitas penanganan perkara, termasuk semakin bertambah jumlah korban yang difasilitasi untuk layanan *visum et repertum* tidak berbayar dari kepolisian. Kemajuan yang sama sebetulnya diharapkan terjadi di pihak pemerintah daerah.

Kemajuan masyarakat sipil juga mulai terlihat yang dimaksudkan di sini organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organisation*/CSO) yang bekerja untuk pengadalayanan. Sejumlah kemajuan yang telah dicapai meliputi 90% kasus ditangani UPPA Polres Pulau Ambon Pulau-pulau Lease

Foto: **Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI**

membutuhkan pendampingan dan ini disediakan oleh CSO, yang kemudian menjadi mitra utama. Hal ini membuktikan telah terbangun mekanisme koordinasi baik di antara CSO maupun antara CSO dengan lembaga penegakan hukum dalam penanganan kasus. Kemajuan terbesar adalah tersedianya Rumah Aman bagi korban, yang dikelola secara swadaya oleh CSO. Rumah Aman ini telah sangat berjasa sebagai tempat berteduh sementara waktu bagi para korban ketika rumah atau lingkungan mereka tidak aman. Tantangannya adalah bagaimana menjamin keberlanjutan dari rumah aman ini.

Kemajuan kebijakan Pemerintah Daerah

Gubernur Maluku mengukuhkan kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) periode 2018-2010 pada Mei 2018. Ini merupakan kemajuan besar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Maluku dalam menyusun struktur organisasi sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau dan melayani korban, pengukuhan ini menjadi harapan bagi pemenuhan kewajiban negara. Mekanisme perencanaan di level provinsi yang dikomandoi oleh BAPPEDA Provinsi Maluku sangat terbuka mengakomodir pemikiran-pemikiran dari kelompok masyarakat sipil termasuk pegiat HAM Perempuan dan anak. BAPPEDA Provinsi Maluku memberikan ruang bagi P2TP2A untuk memaparkan perkembangan layanan bagi korban.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan, dan menempatkan semakin banyak perempuan dan anak sebagai korban. Melihat kondisi terkini, tanggung jawab dan peran penting dari semua unsur masyarakat dan

TREN PELAPORAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK PER BULAN

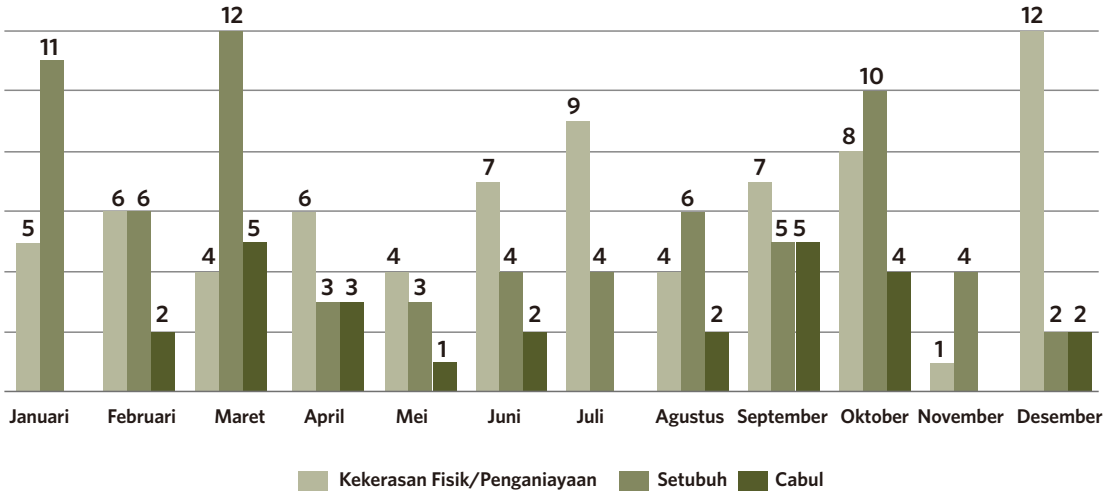

pemerintah menjadi penting. Bagi pemerintah daerah dituntut mampu membuat terobosan untuk membuat korban mudah mendapatkan akses keadilan, dan koordinasi perangkat daerah untuk melindungi korban tentunya tidak meminimalisir langkah-langkah *affirmative* untuk mencegah dengan mengedukasi masyarakat dan penguatan peran lembaga-lembaga pendidikan, termasuk menyasar langsung potensi pelaku, orang tua dan anak-anak.

Rekomendasi yang diajukan oleh penulis sebagai risalah kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak korban kekerasan di Maluku antara lain dengan memperkuat kerjasama antara perangkat daerah dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk pengadaan layanan, termasuk memberikan dukungan bagi kerja-kerja layanan. Membangun mekanisme koordinasi dengan institusi-institusi keumatan atau keagamaan dan pendidikan sebagai aktor kunci dalam upaya menurunkan tren KTP dan KTA. Meninjau pelaksanaan program sekolah ramah anak yang menjadi program KPPPA RI. Memberikan *rewards* bagi sekolah yang berhasil dan *punishment* bagi yang gagal. Membuat terobosan dalam hal penyelenggaraan layanan, diantaranya memasukkan SPPT-PKKTP dalam mekanisme regulasi daerah, penguatan P2TP2A atau kelembagaan sejenis (UPTD PPA) yang efektif.

Bagi pemerintah daerah dituntut mampu membuat terobosan untuk membuat korban mudah mendapatkan akses keadilan, dan koordinasi perangkat daerah untuk melindungi korban tentunya tidak meminimalisir langkah-langkah *affirmative* untuk pencegahan dengan mengedukasi masyarakat dan penguatan peran lembaga-lembaga pendidikan.

Menjajaki hadirnya *Shelter* dan/atau Rumah Aman berbasis pemerintah yang representatif dan memenuhi standar HAM demi memberikan perlindungan bagi korban. Membuat peta situasi perempuan Maluku dengan sistem pendataan yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi Maluku, agar didapatkan gambaran yang utuh dan kontekstual. Terakhir memastikan DPPPA memiliki rencana strategis yang berbasis data, berdasar pada hasil kajian dan responsif kepentingan pemenuhan hak korban dan perlindungan perempuan dan anak Maluku secara komprehensif.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Penulis dapat dihubungi melalui email **lusipeilouw@gmail.com**

PEREMPUAN DALAM RANTAI PERDAGANGAN PALA

Bagian 2 - Selesai

Oleh **BERNADINUS STENI**

Salah satu aspek penting dalam perdagangan pala adalah peran perempuan. Studi INOBU-AKAPe (Institut Penelitian Inovasi Bumi-Aliansi Kaki Abu untuk Perubahan) sepanjang 2018 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, menunjukkan sejumlah alasan faktual dan kebijakan pentingnya peran perempuan.

Tulisan ini hanya mengungkap sekilas masalah domestik yang dihadapi perempuan. Mulai partisipasi mereka dalam mata rantai

Foto: **Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI**

pala, kebijakan pala sebagai tantangan pasar yang terkait dengan petani, pemerintah, maupun pemangku kepentingan.

Informasi yang disampaikan bukan sebagai generalisasi persoalan. Tetapi, mencerminkan situasi sekaligus mencari solusi.

Standar Pala

Petani di Fakfak, Papua Barat, mengelola pala karena bernilai ekonomi dan yang menentukan adalah pasar. Karakter pasar menerima produk pala, tidak statis, melainkan fleksibel mengikuti tuntutan konsumen dan regulasi.

Dusun Pala di Fakfak.
Foto : **INOBU**

Secara bersama, tuntutan tersebut menjadi ukuran yang diambil pasar sebagai standar transaksi. Perlahan, pala dihadapkan sejumlah ketentuan seperti kualitas dan kualifikasi, terlebih sanitasi. Salah satu yang paling umum adalah keamanan pangan.

Indonesia telah mengembangkan standar biji pala melalui SNI 0006 - 1993 dan versi *update* SNI 0006-2015 yang mengatur persentase kadar air, biji berkapang, serangga utuh matai, dan syarat bebas kotoran mamalia, binatang lain, juga benda asing.

Di samping itu, diatur pula syarat visual dan kontaminasi jamur. Misal, standar fuli atau bunga pala SNI 0006 – 1993 masih memberikan toleransi terbatas terhadap kotoran mamalia dan hewan lain. Namun pada SNI 0006-2015, tidak ada toleransi terhadap benda-benda asing tersebut.

Namun, sebagaimana diakui Kementerian Pertanian, standar ini lebih banyak mencerminkan parameter untuk Pala Banda *(Myristica fragrans)*. Belum ada yang spesifik untuk Pala Papua *(Myristica argentea)*.

Untuk Pasar Uni Eropa, *General Food Law, Regulation* (EC) No. 178/2002 mengatur ketentuan hukum keamanan pangan dengan sejumlah syarat, antara lain: kontaminasi dari mikotoksin, salmonella dan pestisida, batas toleransi aflatoksin merupakan senyawa toksik yang disebabkan oleh jamur.

Khusus aflatoksin, Komisi Uni Eropa telah mengeluarkan Commission Regulation (EU) No. 165/2010 yang mengatur batas toleransi

Perempuan di Papua Barat dan bunga pala (fuli) dari hasil panen pala mereka. Pala menjadi komuditas andalan untuk meningkatkan penghasilan mereka.
Foto : **AIP-PRISMA**

kontaminasi *aflatoxins* pada *Capsicum ssp*, lada, pala, jahe, kunyit, dan semua produk rempah dengan campuran komoditas tersebut.

Toleransi untuk kategori aflatoxin B1 hanya dibolehkan sebesar 5.0 µg/kg dan 10 µg/kg untuk total aflatoxins [aflatoxins B1, B2, G1 and G2]. Aflatoksin B1 adalah senyawa yang paling beracun dari tipe-tipe aflatoksin karena berpotensi merangsang kanker, terutama kanker hati.

Saat ini berkembang pula diskusi standar keberlanjutan yang berusaha melacak komoditas untuk mengantisipasi sumber yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Standar dimaksudkan pula untuk memeriksa sejauh mana komoditas bersumber dari pengelolaan yang tidak menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Petani diminta memenuhi standar-standar ini agar produk mereka layak masuk pasar.

Peran perempuan untuk mewariskan pengetahuan tentang pala ke generasi berikut bergulat dengan perubahan sosial terutama, saat generasi muda tidak banyak yang kembali ke Dusun Pala, berorientasi menjadi sarjana bukan kerja kasar sebagai petani.

Satu tuntutan yang acap kali diminta adalah indikator tidak merusak hutan. Kenyataannya, banyak dusun pala di Fakfak berada dalam kawasan hutan. Di Pang Wadar, sebagian dusun pala justru berada di kawasan hutan produksi terbatas. Kenyataan ini tentu perlu kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar tidak menyulitkan petani menghadapi standar keberlanjutan, selain berjuang memenuhi standar lainnya yang sudah berlaku.

Isu sosial

Apa yang terjadi di Fakfak menunjukkan bawha berkebun pala adalah tradisi yang sedang bertahan di tengah gelombang perubahan sosial. Peran perempuan untuk mewariskan pengetahuan pala ke generasi berikut bergulat dengan perubahan sosial tersebut. Terutama saat generasi muda tidak lagi tertarik untuk kembali ke dusun pala dan cenderung memilih untuk melakukan pekerjaan halus ketimbang kerja kasar sebagai petani.

Suara ibu bukan semata cara seorang mama mendorong anaknya sekolah lebih tinggi, tetapi juga refleksi dari pandangan dan kesadaran bahwa pala sulit diandalkan sebagai masa depan.

Harga yang tidak pasti di tengah kebutuhan yang meningkat, mengurangi nilai pala. Watak pala yang tidak membutuhkan banyak perawatan, memungkinkan petani mencari sumber penghasilan tambahan sekaligus tantangan budidaya pala.

Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu hadir memfasilitasi petani agar prasyarat dalam standar tersebut perlahan dapat dipenuhi. Dari segi kebijakan, sudah ada dua ketentuan di tingkat nasional terkait pala, yakni Kepmentan 320/2015 dan Permentan 53/2012. Namun, substansi dua aturan ini belum menyasar Pala Papua, yang seharusnya menyediakan aspek peran perempuan muncul dalam mata rantai pala.

Perda Fakfak No. 6/2016 telah menyentuh isu lokal Pala Papua. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah aktif mempromosikan pengetahuan baru tentang pala. Akan tetapi, upaya itu baru berkembang di beberapa lokasi. Diperlukan replikasi di tempat lain.

Selain itu, ada kebijakan yang memfasilitasi perubahan sikap dasar petani terhadap pentingnya pengetahuan baru budidaya sebagai tuntutan ekonomi pasar saat ini.

Sebuah organisasi perempuan yang kuat mesti hadir memfasilitasi kemampuan perempuan sebagai pelaku pengelolaan pala. Peran ini signifikan, membantu menggerakkan kelompok-kelompok tani yang saat ini pelaksanaannya mengandalkan perempuan, menuju tercapainya mutu yang lebih baik.

Tiga hal yang perlu didukung pemerintah daerah. Pertama, penguatan kelompok perempuan petani pala sebagai agen perubahan budidaya. Dukungan kelembagaan memprioritaskan kelompok perempuan dalam alokasi pembiayaan kelompok tani. Kedua, menyediakan ruang pembelajaran dan lokasi percontohan tingkat kabupaten sebagai forum berbagi kelompok perempuan mengenai budidaya dan pengelolaan produk akhir pala.

Ketiga, mempertemukan pembeli dengan kelompok perempuan guna mengetahui langsung standar yang dibutuhkan pembeli, terlebih ada kesepakatan pembelian jangka panjang.

Pemerintah daerah harus membuat banyak plot, contoh, dan teknik visual yang memudahkan masyarakat untuk meniru. Program pembuatan banyak kebun pala baru, diarahkan untuk menginformasikan metode dan teknik baru, bukan hanya menambah luas.

Pala Dalam Kawasan Hutan

Tantangan isu *traceability* ke depan adalah legalitas pala. Banyak dusun pala saat ini berada dalam kawasan hutan. Solusi legal perlu dibahas untuk menyelesaikan persoalan ini. Salah satunya, mengakui wilayah-wilayah itu sebagai penguasaan komunal adat.

Institusi negara bisa berkolaborasi dengan lembaga tradisional untuk memastikan fungsi perlindungan berjalan. Sejumlah studi menyatakan pala mempunyai karakter tutupan hutan yang efektif.

Upaya perhutanan sosial tengah digalakkan di Fakfak. Program ini seharusnya memperkuat ikatan masyarakat dengan tanah dan sumber daya alamnya. Ikatan antara orang Papua dengan tanah dan wilayahnya dengan basis tradisi yang bisa mereka tuturkan, sebagaimana kebun pala.

Pemerintah sebagai regulator tetap mendampingi cara dan metode pengelolaan yang tepat. Tentunya, dalam skema kerja sama saling menguntungkan. (Selesai)

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari Mongabay dan dapat dibaca pada link:
www.mongabay.co.id/2019/06/30/perempuan-dalam-rantai-perdagangan-pala-bagian-2/amp/

Pintu Tertutup Itu Mulai Terkuak

Oleh **SYAIFULLAH** dan **DESY MUTIALIM**

BANGGA Papua ini program untuk anak asli Papua berusia 4 tahun ke bawah. Uangnya dipakai untuk meningkatkan gizi anak," jelas Mama Alfrida, seorang kader Posyandu, memperkenalkan program BANGGA Papua di distriknya, Paniai Barat, Provinsi Papua. Kalimatnya itu langsung direspon oleh masyarakat, "Ini terkait dengan 666."

Bilangan 666 merujuk pada angka yang dipercaya oleh sebagian masyarakat di sana sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran kristiani. Bila ada hal yang menurut mereka kurang jelas asal-usulnya, mereka biasanya mengaitkannya dengan 666 tersebut.

Isu ini cukup kuat di Paniai dan menjadi salah satu batu sandungan bagi tim Sekber Paniai dalam melaksanakan program BANGGA Papua. Pasalnya, untuk menjadi penerima bantuan, warga harus memiliki e-KTP atau paling tidak, Nomor Induk Kependudukan (NIK). Isu yang beredar adalah bahwa perekaman e-KTP ini adalah salah satu bentuk kegiatan 666 yang selama ini ditentang sebagian warga.

"Ibu, kau mau bunuh anak-anak yang ada di sinikah?" Yang ini respon lain lagi dari orang-orang tua yang ada di tempat sosialisasi saat itu.

Mama Alfrida tidak tersinggung atau marah. Ia justru paham bahwa penjelasan yang sejelas-jelasnya harus diberikan kepada masyarakat agar mereka paham bahwa program BANGGA Papua justru bermaksud membantu mereka. Tujuan BANGGA Papua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua, melalui peningkatan gizi dan kesehatan anak. BANGGA Papua ingin membangun anak-anak Papua yang sehat dan cerdas.

Ia menyampaikan manfaat program untuk masyarakat, tujuan strategis program yang ingin dicapai dan yang paling penting adalah, bagaimana menggunakan dana dari BANGGA Papua itu secara benar, yaitu dipakai untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak.

Mama Alfrida sangat memahami hadirnya respon itu. Di kabupaten tempatnya tinggal dan

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

mengabdi ini, ada sebagian masyarakat yang merasa tidak berhak menerima uang secara cuma-cuma atau tanpa melakukan suatu pekerjaan.

Berbekal dari pengalamannya ini, Mama Alfrida memahami pentingnya sosialisasi yang baik kepada pihak-pihak yang tepat dan harus dilakukan secara intensif. Ia memberikan masukan kepada Sekber Kabupaten Paniai, khususnya untuk menangkal isu 666.

"Apabila ada sosialisasi, harus undang ketua klasis (gereja), koordinator (gereja), pendeta-pendeta dan pastor-pastor supaya mereka bisa ikut sampaikan dan jelaskan tentang manfaat program BANGGA Papua," saran Mama Alfrida. Tokoh-tokoh agama inilah yang diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Penjelasan bahwa dana BANGGA Papua bersumber dari dana Otsus juga perlu disampaikan dengan baik agar masyarakat paham bahwa uang itu adalah hak mereka, orang asli Papua. Jadi tidak perlu merasa tidak nyaman menerimanya. Justru Pemerintah Provinsi menginginkan agar manfaat dana Otsus ini dirasakan langsung oleh orang asli Papua.

Mama Alfrida juga punya saran untuk memastikan validitas data calon penerima manfaat BANGGA Papua. Ia mengusulkan agar kader Posyandu bekerja sama dengan bidan Puskesmas/kampung untuk ikut mendata, bahkan melakukan verifikasi data tentang calon penerima manfaat.

Menurutnya, kader Posyandu dan bidan adalah orang-orang yang paling tahu siapa yang memiliki anak berusia empat tahun ke bawah,

Foto: **Syaifullah/Yayasan BaKTI**

siapa yang baru melahirkan, siapa yang anaknya baru meninggal, siapa ibu yang sering membawa anaknya ke Posyandu, dan lain-lain.

Cerita di atas disampaikan oleh Mama Alfrida dalam pelatihan komunikasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi program BANGGA Papua di Kabupaten Paniai. Ini hanya salah satu cerita. Ada banyak cerita pengalaman dari mama-mama kader Posyandu lain dan bidan Puskesmas yang menjadi peserta pelatihan di bulan Juli 2019 itu.

Mengetuk Pintu, Membuka Hati

Mama Antonia punya cerita yang tidak kalah menarik. Ia memperkenalkan BANGGA Papua lewat gereja. Dengan membawa poster BANGGA Papua, Mama Antonia menjelaskan tentang tujuan dan manfaat program bagi masyarakat. "Mereka tolak saya," ceritanya. "Tapi saya tidak menyerah."

Setelah ditolak, Mama Antonia mendatangi calon penerima manfaat dari pintu ke pintu, dari gereja ke gereja. "Sampai akhirnya mereka mau ikut program BANGGA Papua," jelasnya. Pada saat bersamaan, ia juga ikut mendata anak-anak calon penerima manfaat BANGGA Papua.

Penolakan bukan hanya dialami Mama Alfrida dan Mama Antonia. Mama Oktopina Kadepa, seorang bidan dari Puskesmas Tuguwa Distrik Aweida, dan Mama Elis anggota Sekber Paniai, juga punya pengalaman pahit ketika menyosialisasikan BANGGA Papua.

Mama Elis bahkan pernah dituduh beritikad buruk ketika menyosialisasikan BANGGA Papua. "Ah, kamu itu mau jual sa punya anak. Jadi saya tidak mau kasih (daftar) saya punya anak," kata seorang bapak.

"Saya pergi lagi ke dia dua kali, tiga kali, saya jelaskan baik-baik, dan akhirnya mereka mengerti dan saya daftar anak-anaknya," cerita Mama Elis.

Mama Elis melakukan sosialisasi di lima kampung. Waktu itu, hanya dua kampung yang mau mendaftarkan anak-anaknya. "Tiga kampung masih baku marah. Itu pengalaman saya ketika sosialisasi awal. Setelah Desember 2018, mereka sudah saksikan sendiri menerima manfaat (dana). Setelah itu baru mereka senang-senang datang sendiri daftar ke kami," jelas Mama Elis tersenyum lebar.

Pantang Menyerah

Penolakan-penolakan itu tidak membuat pelaksana sosialisasi menyerah. Mereka terus melakukan pendekatan persuasif melalui pertemuan pribadi dengan mama-mama yang memiliki anak berusia empat tahun ke bawah. Program BANGGA Papua memang menyasar anak-anak orang asli Papua yang berusia di bawah empat tahun.

Ketika tidak diterima di tempat sosialisasi umum, mereka mendekati calon penerima manfaat satu per satu. Para bidan dan kader

Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

Posyandu datang ke rumah mereka dan menceritakan tentang BANGGA Papua, hingga mereka paham.

"Tetapi kami tidak mau memaksa. Dan tidak boleh memaksa. Yang tidak mau, ya kami kasih tinggal saja," jelas mereka.

Para pelaksana sosialisasi ini memang sudah memperoleh pelatihan komunikasi persuasif, yaitu teknik bicara yang dapat memengaruhi cara pikir orang lain. Anggota Sekber Paniai juga pernah menerima pelatihan tentang cara memetakan tantangan-tantangan sosialisasi, memetakan aset dan mencari jalan keluar untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Pendekatan persuasif yang terus menerus dengan sentuhan pribadi dan memahami konteks budaya lokal itu akhirnya membuahkan hasil. Apalagi setelah mereka melihat bukti bahwa penerima manfaat benar-benar menerima dana di bulan Desember 2018. Mereka yang awalnya menolak, akhirnya ikut mendaftarkan anaknya.

Institusi gereja menjadi jalur utama dalam menyosialisasikan BANGGA Papua. Tokoh agama memang menjadi salah satu aktor utama yang paling didengar dan dipercaya masyarakat di Paniai.

Mama Priska, salah seorang anggota Sekber Paniai, meminta waktu pada pastor di gerejanya untuk menjelaskan kepada masyarakat yang hadir di gereja, tentang program BANGGA Papua.

Salah satu keberhasilan sosialisasi adalah adanya kolaborasi multi pihak. Sekber bekerjasama dengan kader Posyandu, bidan Puskesmas/ kampung, PKK dan tokoh agama. Menurut Nerius, ketika melihat elemen-elemen ini bersatu maka masyarakat akan memahami bahwa BANGGA Papua bukan tipu-tipu.

Usai misa (kebaktian gereja), Mama Priska pun menyampaikan tentang pentingnya kualitas anak-anak Papua yang sehat dan cerdas untuk kesejahteraan keluarga dan membangun tanah Papua. BANGGA Papua hadir untuk memampukan masyarakat mencapai tujuan ini.

Upaya Mama Priska disambut baik oleh Pastor Paroki Gereja Katolik di Paniai. Pastor Santo Tekege, Pr., melanjutkan sosialisasi dan memotivasi masyarakat yang hadir untuk ikut program BANGGA Papua. Dia menyampaikan bahwa uang BANGGA Papua berasal dari dana Otsus dan menjadi hak orang Papua.

"Gunakan uang ini untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak. Jangan disalah-gunakan," kata Pastor Santo dengan tegas, di Paroki Epouto, Distrik Yatamo, Paniai.

Mengatasi Tantangan yang Kompleks

Sosialisasi BANGGA Papua di Paniai memang penuh tantangan. Menjangkau seluruh distrik dan kampung di Paniai bukan hal mudah bagi Sekber di tengah keterbatasan personil dan dana. Paniai punya 216 kampung dan 24 distrik. Bahkan beberapa kampung hanya bisa dijangkau dengan helikopter atau jalan kaki berhari-hari.

Masyarakat Paniai juga berpikir kritis. Banyak warga yang tidak serta merta mau menjadi peserta program dan menerima dana, meski anak-anak mereka memenuhi persyaratan untuk menjadi calon penerima manfaat BANGGA Papua.

Nerius Pakagi, anggota Sekber Paniai menyampaikan bahwa salah satu keberhasilan sosialisasi adalah adanya kolaborasi multi pihak. Sekber bekerjasama dengan kader Posyandu, bidan Puskesmas/kampung, PKK dan tokoh agama. Menurut Nerius, ketika melihat elemen-elemen ini bersatu maka masyarakat akan memahami bahwa BANGGA Papua bukan tipu-tipu.

"Kalau masyarakat sudah paham BANGGA Papua, bukan kita yang cari mereka, tapi mereka yang datang cari kita," tegas Nerius lagi.

Bekerjasama dengan kader Posyandu, bidan Puskesmas dan kampung dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas jangkauan sosialisasi.

Pilar Pembangunan di Paniai

Kerjasama dengan kader Posyandu dan bidan Puskesmas/kampung serta tokoh agama ini sangat membantu kerja Sekber Paniai. Selepas pembayaran dana tahun 2018 lalu, Sekber Paniai masih kekurangan sumber daya untuk melakukan pendataan dan sosialisasi. Masih banyak kampung yang belum terjangkau, dan masih banyak masyarakat yang belum paham BANGGA Papua. Jangankan warga, aparat kampung dan distrik pun masih banyak yang belum paham.

Mereka mempertanyakan keakuratan beberapa data. Sekber Paniai pun mendengarkan masukan dari mereka karena mereka adalah orang yang paling paham kondisi ibu dan Balita di distrik dan kampung tempat mereka bertugas dan tinggal.

"Mereka ini yang paling tahu soal anak-anak di kampung karena mereka yang mendata, mereka juga yang menimbang setiap bulan. Jadi mereka bisa ikut melakukan verifikasi data yang sudah dikumpulkan oleh anggota Sekber atau aparat kampung dan distrik," kata Eli Yogi, Ketua Sekber Paniai.

Kader Posyandu ini juga aktif memberikan nasihat tentang pemanfaatan hasil kebun di sekitar rumah untuk membantu menjaga dan meningkatkan gizi anak.

Uang sebesar 200 ribu rupiah per bulan per anak yang diberikan oleh program BANGGA Papua tentu terhitung kecil untuk daerah di pegunungan tengah Papua seperti Paniai. Namun, kader Posyandu dan bidan Puskesmas/kampung itu tidak fokus hanya kepada jumlah uang yang diberikan. Mereka menekankan bahwa makanan bergizi tidak hanya datang dari makanan yang dibeli, karena sesungguhnya di sekitar mereka sudah ada bahan makanan bergizi yang bisa digunakan untuk menjaga gizi anak.

"Uang ini cuma dipakai beli yang tidak ada di kebun atau di sekitar rumah saja," kata Mama Meli Kuniai, salah satu bidan dari Puskesmas Nei. Mama Beatrice Tekege, kader Posyandu lainnya, malah menilai uang 200 ribu rupiah per bulan itu sebagai berkat.

"Saya percaya, uang 200 ribu rupiah itu bisa menjadi berkat. Seperti 5 roti dan 2 ikan yang setelah diberikan kepada 5000 orang, masih tersisa 12 bakul," katanya mengutip sebuah kisah dalam Alkitab.

Hal-hal seperti inilah yang sebelumnya tidak pernah diangkat dalam setiap sosialisasi program BANGGA Papua di Kabupaten Paniai.

Peran, pengetahuan, pengalaman dan komitmen mereka terbukti bisa menembus banyak masalah di lapangan. Bahkan ketika banyak penolakan, mereka tidak menyerah dan terus berusaha menyosialisasikan BANGGA Papua sekaligus membantu melakukan pendataan.

Bagi Sekber Paniai, mama-mama yang luar biasa ini adalah pilar pembangunan di Paniai. Pilar pembangunan yang ikut mengokohkan program BANGGA Papua di Paniai.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang BANGGA Papua, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

MELAWAN PERSEBARAN DISINFORMASI DI INDONESIA

Oleh **TREVILIANA EKA PUTRI** dan **DEWA AYU DIAH ANGENDARI**

Pada Mei 2019, Pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan akses terhadap media sosial selama tiga hari menyusul adanya unjuk rasa terkait pengumuman hasil Pemilu yang berujung rusuh di Jakarta. Pemerintah mengklaim tindakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dikhawatirkan dapat menyulut kekacauan yang lebih besar.

Keputusan pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra. Beberapa analis menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai mencederai kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan mendapatkan informasi.

Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Selain dikhawatirkan mengancam kebebasan berpendapat, pembatasan akses terhadap media sosial juga dinilai tidak efektif. Larangan serupa yang diterapkan di Sri Lanka sesaat setelah serangan teroris pada bulan April lalu justru menimbulkan kecemasan, keraguan, dan ketakutan di tengah masyarakat serta berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi. Di Indonesia sendiri, selama pembatasan akses berlangsung, hoaks nyatanya masih dapat beredar melalui *Virtual Private Networks* (VPN) atau jaringan privat virtual.

Kami berpendapat pendidikan literasi digital yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat akan lebih efektif dalam menangkal penyebaran disinformasi.

Literasi Digital untuk Semua

Literasi digital merupakan kemampuan setiap individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, serta mengevaluasi informasi melalui perangkat teknologi digital. Kemampuan ini mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan praktis. Seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi digital ketika ia tidak hanya mampu menemukan informasi, namun juga mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum membagikannya ke orang lain.

Sayangnya, riset terakhir menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital di Indonesia mayoritas hanya dilaksanakan di level perguruan tinggi. Hal ini tentunya tidak memadai mengingat mayoritas pengguna aktif internet tidak selalu berada di bangku universitas.

Berdasarkan data dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, total mahasiswa di Indonesia berjumlah sekitar 6.9 juta jiwa atau hanya sekitar 5% dari keseluruhan pengguna internet.

Melihat kesenjangan tersebut, pemerintah sudah selayaknya menginisiasi gerakan literasi digital nasional yang mampu menjangkau seluruh kalangan. Hal tersebut tentunya bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan kolaborasi dengan platform media sosial dan masyarakat.

Seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan literasi digital ketika ia tidak hanya mampu menemukan informasi, namun juga mengecek kebenaran informasi tersebut sebelum membagikannya ke orang lain.

Saat ini, pemerintah telah mencoba menciptakan kolaborasi ini dengan menggalakkan literasi digital melalui Siberkreasi. Siberkreasi merupakan gerakan literasi digital nasional yang berisikan komunitas pemerhati isu tersebut yang juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuan utama dari dibentuknya gerakan ini adalah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada sebanyak mungkin masyarakat untuk dapat mencari dan memeriksa informasi di berbagai platform digital.

Selain itu, pemerintah juga dirasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu melibatkan sekolah untuk mengajarkan literasi digital sejak dini. Beberapa negara seperti Finlandia, Canada, dan Australia telah memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum nasional sekolah-sekolah mereka.

Melibatkan Penyedia Platform Media Sosial

Sejalan dengan pemerintah, platform media sosial juga perlu untuk meningkatkan upaya dalam mencegah terjadinya persebaran hoaks dan disinformasi pada platform mereka.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi yang tersebar di Indonesia paling banyak ditemukan pada platform media sosial Facebook (82,5%), Line (11, 37%), dan Twitter (10,38%). Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa platform media sosial memegang peran penting dalam terjadinya persebaran disinformasi di kalangan masyarakat.

Namun, para penyedia platform media sosial di Indonesia belum menerapkan tindakan yang cukup untuk dapat turut serta mencegah persebaran disinformasi dan berita bohong di kalangan penggunanya. Oleh karena itu,

pemerintah dan penyedia platform perlu bekerja sama untuk mengatasi hal tersebut.

Beberapa negara telah menerapkan peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan media sosial di kalangan masyarakat.

Pemerintah Jerman, misalnya, melalui sebuah kebijakan yang disebut sebagai Undang-Undang Penegakan Jaringan 2017 (2017 *Network Enforcement Act* (NetzDG)) mengharuskan penyedia platform media sosial untuk menghapus konten-konten ilegal (termasuk di dalamnya hoaks dan ujaran kebencian) yang tersebar pada platform mereka dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah terdapat laporan permohonan penghapusan konten. Apabila platform tersebut gagal dalam menjalankan kewajiban tersebut, penyedia platform akan dikenakan denda yang besarannya mencapai 50 juta Euro (atau sekitar 800 juta Rupiah).

Pemerintah Prancis melalui Undang-Undang Berita Palsu-*Fake News Law*, pun telah mewajibkan penyedia *platform* media sosial untuk melaporkan secara transparan terkait *algoritme* yang digunakan dalam media sosial tersebut. Penyedia platform juga diwajibkan untuk menambahkan fitur baru yang dapat memungkinkan pengguna media sosial untuk "menandai" konten-konten yang dianggap merupakan sebuah bentuk disinformasi.

Melihat beberapa praktik yang telah dilakukan di beberapa negara tersebut, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah serupa untuk persebaran disinformasi melalui penegakan kebijakan khusus terhadap penyedia platform media sosial. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat persebaran disinformasi di media sosial.

Pentingnya Peran Komunitas dan Masyarakat

Pemerintah juga perlu untuk bekerja sama dengan komunitas lokal dan LSM terkait untuk menyebarkan kampanye literasi digital untuk memperluas jangkauan persebaran pesan.

Salah satu contoh dari inisiasi yang melibatkan banyak peran dari masyarakat adalah organisasi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini berfokus pada upaya-upaya advokasi kepada masyarakat terkait hoaks. Mafindo juga menginisiasi sebuah komunitas kolaboratif untuk cek fakta yang bekerja sama dengan 25 media lokal dan nasional. Kolaborasi tersebut dinilai sangat membantu masyarakat untuk menangkal hoaks dan berita palsu yang banyak tersebar selama pemilu presiden pada bulan April lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa, melalui kolaborasi, pemerintah dapat mengoptimalkan kampanye dan gerakan terkait literasi digital. Dengan bekerja bersama komunitas lokal, pemerintah juga dapat berbagi cara untuk mencegah dan mengurangi penyebaran disinformasi.

Kolaborasi antara aktor-aktor yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan terkait persebaran disinformasi di Indonesia sangatlah penting.

Kolaborasi antara pemerintah, komunitas masyarakat, dan penyedia platform media sosial merupakan sebuah hal penting untuk membangun kesuksesan gerakan literasi digital pada skala nasional. Penting bagi setiap aktor untuk dapat memainkan perannya masing-masing dalam upaya menangkal persebaran hoaks dan disinformasi di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Treviliana Eka Putri adalah dosen pada Fakultas Hubungan Internasional dan peneliti pada Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada, **Dewa Ayu Diah Angendari** adalah dosen pada Pakultas Ilmu Komunikasi dan peneliti pada Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini bersumber dari The Conversation Edisi Indonesia dengan tautan **https://theconversation.com/melawan-persebaran-disinformasi-di-indonesia-119285?**

RALAT

Pada BaKTINews Edisi 163 Agustus-September 2019 terjadi kesalahan nama penulis artikel berjudul **Replikasi Praktik Cerdas Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)** oleh **Nehru Sagena**, seharusnya **Sumarni Arianto** dan dapat dihubungi melalui **info@bakti.or.id**

Redaksi memohon maaf atas kesalahan penulisan tersebut.

Magdalena Patiran Kepala Kampung Torea

Oleh **PUTHUT E.A**

Sepintas saja berjalan di Kampung Torea, langsung terasa ada yang berbeda dari kampung-kampung lain. Rumah-rumah permanen kokoh berdiri dengan halaman yang rapi, jalanan juga tampak bersih. Kampung yang merupakan bagian dari Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak ini, tentu bukan sembarang kampung.

Memang benar. Hanya butuh waktu singkat, bakal diketahui bahwa kampung ini dipimpin oleh seseorang yang memiliki visi, dan didukung sepenuhnya oleh aparat kampung. Selain itu, warganya pun memberi dukungan penuh sehingga kampung ini bisa menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Kualitas hidup warga pun tinggi dilihat dari berbagai sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kepala Kampung Torea adalah seorang perempuan. Namanya: Magdalena Patiran. Usianya 49 tahun, dan ini adalah periode kedua kepemimpinannya. Sejak muda, Magdalena telah aktif berorganisasi, terutama di organisasi gereja. Begitu terpilih sebagai Kepala Kampung pada 2010, perempuan kelahiran asli Torea ini langsung membuat gebrakan yakni dengan membuat Rumah Belajar.

Gagasan tentang Rumah Belajar ini sederhana. Dia melihat ada ancaman serius yang terjadi di kampungnya dengan banyaknya anak-anak muda yang mabuk, dan anak-anak kecil yang menghirup lem

Aibon. Dengan Rumah Belajar, anak-anak jadi lebih fokus belajar dan tidak terpengaruh hal negatif di sekitarnya. Pukul dua siang hingga empat sore, anak-anak usia SD wajib datang di Rumah Belajar. Di sana sudah disediakan guru yang akan mengajar berbagai pelajaran mulai dari Bahasa Inggris, membaca, menulis, dan berhitung. Para guru yang mengajar diberi insentif dari dana kampung. Selain itu, di Torea juga ada jam belajar di malam hari. Sehingga tidak ada anak-anak yang nongkrong dan keluar rumah sembarangan saat malam hari.

Usai membuat gerakan itu, Magdalena dan aparat kampung lain membuat terobosan yakni penguatan ekonomi rumah tangga. Sebanyak 42 perempuan yang telah berumah tangga diberi modal dan pendampingan untuk melakukan bisnis. Mereka berjualan, dari mulai hasil kebun sampai hasil laut. Di luar dugaan, bisnis mereka berjalan lancar, makin membesar, dan belum ada yang gagal dalam makna menghentikan aktivitasnya. Bahkan pada musim durian, perempuan-perempuan itu menjual durian sampai ke Sorong dan Timika dengan naik kapal.

Terobosan dari sisi ekonomi belum cukup. Ada juga program ternak ayam yang dikelola secara kolektif yakni oleh kaum perempuan dan para pemuda lewat karang taruna. Program ini sudah berjalan di tahun ketiga. Semenjak masuk tahun ketiga, kampung sudah tidak lagi memberikan modal dan pendampingan. Usaha itu sudah berjalan dengan baik, dan memberikan keuntungan yang nisbi bagus bagi para warga yang mengelolanya.

Tidak berhenti di sana, lagi-lagi para aparat kampung dengan dipimpin oleh Magdalena memberi prioritas khusus di bidang kesehatan. Posyandu diaktifkan. Bukan hanya Posyandu untuk balita tapi juga untuk lansia. Alat dan obat-obatan yang tidak disediakan pemerintah dibeli dengan dana kampung, misalnya alat ukur gula darah, asam urat, dan kolestrol. Selain itu diberikan makanan tambahan untuk balita dan lansia. Untuk lansia, misalnya, diberikan minuman susu penguat tulang, untuk balita berupa bubur kacang hijau dan susu balita. Selain itu, pihak kampung pun bekerjasama dengan kesusteran gereja untuk membantu anak-anak yatim piatu. Dana dikucurkan ke sana. Rumah yatim piatu itu bahkan menerima juga anak yang berasal dari kampung lain. Total anggaran kampung untuk bidang kesehatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan di atas, di tahun 2018 sebesar 40 juta rupiah.

Semua bentuk kegiatan dan dukungan kampung itu makin semakin maksimal ketika program KOMPAK-LANDASAN II mulai masuk Torea. Magdalena beserta beberapa aparat kampung terlibat aktif dalam pelatihan dan pendampingan yang dilakukan KOMPAK-LANDASAN II, baik itu kegiatan yang langsung dengan kampung, maupun pelatihan-pelatihan Standar Pelayanan Minimum dan Manajemen Berbasis Sekolah untuk sekolah-sekolah. Intervensi KOMPAK-LANDASAN II dengan data SAIK terasa penting bagi Magdalena dan aparat kampung lain, untuk memaksimalkan pelayanan masyarakat. Data SAIK dijadikan landasan bagi musyawarah kampung, dan menentukan titik-titik program prioritas.

Kampung juga mulai melibatkan pihak sekolah dan Puskesmas dalam musyawarah kampung. Melalui musyawarah kampung itu, SD YPPK Torea diberi bantuan untuk membuat fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang lebih bagus dan lebih sehat. Kemudian dibangunkan pula bak penampungan air. Dua orang guru honorer diberi insentif. Total anggaran yang dikeluarkan kampung untuk SD YPPK Torea pada tahun 2018 sebesar 35 juta rupiah. Tidak lupa, program kejar paket A, B, dan C ditingkatkan lagi.

Administrasi kampung pun mulai tertata apik. “Banyak hal yang saya dulu tidak tahu tentang administrasi kampung, kini saya dan para aparat kampung jadi tahu karena program KOMPAK-LANDASAN II,” ungkap Magdalena. “Kerja-kerja kami jadi lebih terarah dan tertib.”

Menurut Jimmy Pieter Letsoin (49), Sekretaris Kampung Torea, Magdalena adalah seorang kader yang dipersiapkan oleh tetua kampung Torea. “Kami dulu berpikir, kita tidak bisa membiarkan kampung ini begini terus tanpa kemajuan yang berarti.

“Papua tidak akan bisa maju kalau tidak dipimpin oleh orang yang baik dan punya ketegasan. Akhirnya kami membuat semacam pengkaderan kepemimpinan lewat gereja.” Magdalena lalu aktif di gereja dan dia diberi kesempatan oleh para tetua kampung untuk

Pendidikan adalah investasi penting di Papua Barat. Program '2025 Satu Rumah Satu Sarjana' jelas tidak main-main. Kini Ibu Magdalena dan aparat kampung mulai mempersiapkan banyak hal untuk mencapainya. Foto : **Jenny P. Karay/Yayasan BaKTI**

berkembang. "Kami berharap, gereja, masjid, dan tempat ibadah lain harus bisa menjadi ajang untuk melahirkan para pemimpin. Sebab pemimpin yang punya kesadaran religius, tentu akan bergerak dengan moral. Bukan karena uang atau ambisi lain."

Setidaknya ada dua orang lagi yang juga hampir setiap hari membantu Magdalena bekerja, Elsina Hambore (34) dan Sartince Kabes (28). Elsina adalah bendahara kampung, sementara Sartince adalah kader kampung yang aktif mengawal dan menjalankan proses SAIK di Torea. Kedua perempuan itu, sekalipun masih muda, sudah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang baik dan penuh dedikasi.

Magdalena mengingatkan kita pada Risma, Walikota Surabaya yang menjabat dua periode. Selain tegas, dia juga punya sisi kelembutan sebagai seorang ibu. Pernah suatu masa, Magdalena kesal sekali karena pohon enau di kampung Torea dijadikan bahan baku miras. Dia dan aparat kampung sudah mengingatkan para warga agar tidak menjadikan pohon enau itu sebagai bahan miras, termasuk orang dari luar kampung yang memproses air nira menjadi sopi.

Karena berkali-kali imbauan itu tidak juga dipedulikan, Magdalena dan aparat kampung, didukung oleh warga, dan melibatkan pihak kepolisan dan pihak distrik, mengambil tindakan tegas. Magdalena memimpin sendiri operasi 'tebang enau'. Dia ikut memegang gergaji mesin menebang enau-enau yang ditoreh untuk memproduksi miras. Ketegasannya membuat banyak orang yang punya niat tidak baik menjadi keder.

Ketika terpilih kali kedua sebagai Kepala Kampung, Magdalena mencanangkan program '2025 Satu Rumah Satu Sarjana'. Program ini jelas tidak main-main. Karena untuk menuju ke arah sana, dia dan aparat kampung harus mempersiapkan banyak hal. Setidaknya menurut Magdalena, dia optimistis program ini bakal tercapai. "Tahun ini saja, sudah 60 persen anak Torea yang lulus SMA melanjutkan ke perguruan tinggi," ujarnya dengan senyum dan wajah yang teduh tenang.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN II dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

Situs Purbakala Seko Nasibmu Kini

Oleh **EKO RUSDIANTO**

Bukan hanya punya alam nan indah, Seko kaya situs purbakala. Kondisinya memprihatinkan.

DATARAN tinggi Seko, Sulawesi Selatan masih kemarau. Udara malamnya semakin dingin, tapi siang hari panasnya menyengat. Permukaan jalannya dipenuhi gumpalan debu, amat licin.

Menyambangi Kecamatan Seko, sekitar 120 km dari kota Kecamatan Sabbang atau sekitar 150 km dari Masamba, pusat Kabupaten Luwu Utara, dan menikmati jalur untuk mencapainya ibarat memasuki ruang waktu. Sensasinya dua bidang peradaban modern dan daerah terisolir. Wilayah yang dikenal pula sebagai kawasan To Kalekaju ini dikurung Pegunungan Quarles dan diapit Pegunungan Verbeek. Di sinilah peradaban modern, masa neolitikum di Sulawesi bermula.

Bersama 15 orang dari tim Kajian Delineasi Situs Seko, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya menyambanginya pada 3 Oktober 2018 untuk menemukan dan mengenali situs masyarakat. Garisnya dari Kalumpang di Mamuju Sulawesi Barat, menanjak menuju Seko dan Rampi di Sulawesi Selatan dan menukik kembali ke lembah Lore di Sulawesi Tengah.

Ini adalah kampung cantik dengan warga yang ramah dan rumah adat mengagumkan. Sayang, rumah adat itu hanya beberapa yang bertahan. Di Kampung Singkalong dan Eno, masing-masing terdapat satu buah rumah panggung dengan umpak batu menawan. Dengan fondasi batu, bangunan itu disangga tiang-tiang kayu bulat yang diletakkan di atas batu dan dipahat mengikuti posisi batu.

Sepintas, bangunan itu tampak rapuh. Tapi ketika gempa dengan magnitudo 7,7 menghantam Palu dan Donggala pada akhir September 2018, di mana wilayah Seko ikut terdampak, tak ada bangunan yang rusak dan tak ada korban jiwa. Rumah umpak batu malah mengayun seakan memiliki *shockbreaker*.

Situs-situs yang Terabaikan

Seko kini sedang dikepung delapan perusahaan pemilik HGU (Hak Guna Usaha). Data dari kantor Kecamatan Seko menunjukkan delapan perusahaan itu akan bergerak di bidang perkebunan, pertambangan, hingga energi. Konsesi itu bakal merebut sawah hingga kebun warga.

Tak hanya mengancam lahan penghidupan warga, konsesi juga mengancam puluhan situs yang berada dalam area konsesi. Hanya situs Bongko yang relatif aman karena menjadi perkecualian lantaran dianggap sebagai kampung tua masyarakat Eno. PT Seko Fajar, yang sejak 1980-an memegang izin perkebunan teh, mengeluarkannya seluas 60 hektar.

Tapi situs-situs yang lain tinggal menunggu waktu. Situs Hatu Lalian, yang berdampingan dengan pagar bandara, bahkan teronggok di antara ilalang rapat. Situs ini adalah umpak batu berjumlah empat buah yang berada di bukit kecil. Di bawahnya, terdapat hamparan sawah.

Situs Hatu Lila atau Batu Lidah di perkebunan kakao. (Eko Rusdianto/Historia).

Segaris dengan Laliang, terdapat Issong Batu (Kalamba). Situs dipercayai sejarawan Inggris Ian Caldwell pada 1992 sebagai artefak yang dibawa masyarakat dari Lembah Bada. "Tidak seperti itu. Itu dibuat oleh Talammia (disebut juga Talambia)," kata Abraham Taburu (50 tahun) *Tobara Hono* ke-21.

Tobara adalah gelar dari masyarakat yang diberikan pada seorang pemimpin adat (komunitas). Seko punya sembilan wilayah adat yang disahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Pemimpin komunitas-komunitas adat itu memiliki gelar tersendiri: *To Bara, To Makaka*, dan *To Kei*. Para pemimpin komunitas itu dipilih berdasarkan kekerabatan dan keturunan.

Bagi Abraham, Laliang dan Issong Batu adalah milik Talammia yang dibuat sendiri olehnya. Talammia diceritakan sebagai seorang

yang sangat besar. Tingginya tak bisa diprediksi, namun bisa diilustrasikan saat Talammia meletakkan kakinya di badan sungai, kaki itu digunakan orang-orang untuk menyeberang.

Laliang juga dipercaya sebagai dapur tempat sang raksasa memasak. Sementara, Issong Batu adalah tempatnya menumbuk padi. Jarak antara dua situs ini sekitar dua kilometer. "Nah tempat makannya itu ada di dekat sungai, jadi kalau bersandar punggungnya ada di gunung," kata Abraham.

Laliang adalah situs yang sepi. Pada ujung batunya ada noda hitam karena lelehan aspal ketika bandara sedang renovasi mengganti landasan pacu dari rumput menjadi aspal. Umpak batu itu dijadikan tungku memasak aspal. Tak ada warga keberatan. Bahkan beberapa warga Seko sendiri yang menjadi buruh harian ikut melakukan aksi itu.

Situs Kalaha Kammuttu (Batu Dakon) yang berada di bukit ilalang di Kampung Lodang, sekitar 30 km dari Eno, juga mengalami nasib serupa. Tak ada penanda yang menunjukkan keberadaannya. Kalaha berada di pinggir jalan setapak yang menghubungkannya ke sebuah sungai yang sedang dalam pengerjaan proyek irigasi. Situs itu berkali-kali dilindas alat berat. Bahkan warga yang melintas tak segan menapakinya.

Situs lain, Lingku, kondisinya juga tak terawat dan ditumbuhi rerumputan. Lingku dipercaya masyarakat Lodang sebagai tempat kelahiran anak seratus. Menurut *Tobara Lodang* Nasrullah Kande (50), pada masa lalu Lingku dihuni seorang pasangan yang memiliki 100 anak.

Lingku berada di bukit kecil yang dikelilingi persawahan yang masuk dalam areal HGU Seko Fajar. Untuk mencapainya, harus melompati parit selebar dua meter, lalu membungkuk menyelinap di antara ilalang. Penanda situs ini hanyalah batu berdiameter 50 cm. "Ini anak tangga untuk naik ke rumah anak 100 itu," kata Nasrullah.

Tinggalan lain yakni Situs Bata', berupa batu monolit yang tertancap di tengah rawa di sisi jalan utama Lodang menuju Eno. Situs ini pernah jatuh. Atas inisiasi sebuah lembaga swadaya masyarakat, situs ini digotong warga ke tempat asalnya dan ditancapkan menggunakan cor semen.

Bata' dikisahkan sebagai jelmaan dari ari-ari kerbau milik orang bernama Tabuke. Ketika kerbaunya melahirkan, Tabuke membawa ari-arinya dalam sebuah wadah karena berpindah tempat gembala. Namun, ketika wadah itu terbuka, ari-ari tersebut malah bertumbuh panjang dan menjadi batu.

Akhirnya, ari-ari yang menjadi batu itu menjadi penanda untuk tempat gembala. Menurut Nasrullah, air di sekitar situs rasanya asin dan itu menjadi kesukaan ternak. Tapi, itu sepertinya hanya *folklore*. Ketika saya mencoba air itu, rasanya tawar.

Situs lainnya, Benteng Tammatang, berada di punggung bukit dan diapit dua sungai. Di tempat ini, ilalangnya sudah menghitam bekas pembakaran. Ada banyak batuan yang tersebar, tanpa pola. Nasrullah percaya, batu-batu itu adalah umpak batu. "Di sini, rumah orang dulu. Ada pemimpin kami namanya Tabolle. Dia membangun benteng dan menghalau para penyusup. Termasuk meredam pasukan dari Datu Luwu," katanya.

Tabolle punya keahlian pedang cukup mengagumkan. Dan memiliki istri dengan paras cantik. Datu Luwu jatuh cinta pada sang istri, dan menggunakan berbagai macam strategi untuk merebutnya. Tabalolle melawan dan beberapakali memukul mundur pasukan Luwu.

Pasukan Luwu akhirnya membuat siasat menggali lubang dan menanamkan duri di dasarnya. Ketika Tabolle menyerang, dia terjatuh ke lubang itu dan menemui ajalnya. Sang istri jadi tawanan. Namun, di antara jalan sempit dan jurang yang dalam di tempat bernama Mangkaluku, istri Tabolle melompat dan menjatuhkan Datu Luwu beserta beberapa pengawalnya.

"Jadi Seko (maksudnya Lodang, red.) tak pernah dikalahkan Luwu dalam perang, tapi dalam strategi," kata Nasrullah.

Dalam beberapa tradisi tutur masyarakat Seko, hubungan dan pengaruh Luwu cukup terasa. Luwu adalah kerajaan yang menundukkan wilayah itu. Jika tak ada penundukkan oleh Luwu, kawasan itu mungkin tak bernama Seko.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari situs Historia.id dan dapat dibaca pada link
https://historia.id/kuno/articles/situs-purbakala-seko-nasibmu-kini-voo8p

Usaha yang didanai Dana Desa
Foto : **Indira Falmayani/Yayasan BaKTI**

ADVOKASI DANA DESA

Oleh
M. GHUFRAN H. KORDI K.

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat menguncurkan dana desa untuk pembangunan desa, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disebutkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, dengan prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun dengan Peraturan Desa (Perdes).

Karena pengesahan APBDesa melalui Perdes maka masyarakat mempunyai kesempatan memberi masukan terhadap APBDesa. Tentu tidak semua masyarakat mempunyai akses untuk ikut memengaruhi proses penyusunan APBDesa. Perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, anak dan kelompok marjinal lainnya, adalah kelompok rentan dengan akses terbatas untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

Kelompok konstituen di beberapa desa mempunyai pengalaman dalam mengadvokasi Dana Desa sehingga dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan strategis bagi kebutuhan masyarakat. Advokasi yang dilakukan tidak selalu memengaruhi atau meminta pemerintah desa untuk mengalokasikan Dana Desa bagi kebutuhan tertentu, tetapi oleh pemerintah desa yang mengetahui aktivitas kelompok konstituen, mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan-kegiatan Kelompok konstituen yang berkontribusi pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.

Kelompok Konstituen Walang Hatukau

Kelompok Konstituen Walang Hatukau terdapat di Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Sejak 2019 kelompok konstituen ini mendapat alokasi Dana Desa sebesar 30 juta rupiah. Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan kasus perempuan dan anak yang terjadi di Negeri Batu Merah.

Alokasi Dana Desa untuk penanganan kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah cukup menarik. Pasalnya advokasi yang dilakukan Kelompok Konstituen Walang Hatukau cukup mudah. Ketika Kelompok Konstituen mengusulkan alokasi Dana Desa untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak dalam musyawarah negeri, langsung mendapat dukungan dari berbagai pihak, tidak ada yang mempertanyakannya.

Kelompok Konstituen Walang Hatukau telah dikenal dan cukup aktif dalam membantu urusan-urusan warga. Pengurus kelompok konstituen menerima berbagai pengaduan dari warga terkait dengan pelayanan publik, termasuk pengaduan mengenai kasus-kasus perempuan dan anak.

Penanganan kasus perempuan dan anak oleh Kelompok Konstituen Walang Hatukau cukup maju. Apalagi kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah cukup banyak, sehingga kelompok konstituen harus bekerja ekstra keras. Kasus-kasus ringan dimediasi sehingga selesai di tingkat kelompok konstituen atau di tingkat kantor negeri. Sedangkan kasus-kasus yang diproses dan membutuhkan pendampingan, maka akan didampingi hingga kasus tersebut selesai. Jika pun suatu kasus tidak selesai di lembaga yang telah dirujuk, namun kelompok konstituen telah bekerja maksimal.

Kehadiran kelompok konstituen di beberapa negeri/desa cukup membantu P2TP2A Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Apalagi P2TP2A Kota Ambon dan P2TP2A Provinsi Maluku belum mempunyai perangkat yang memadai untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Karenanya kelompok konstituen adalah lembaga di tingkat komunitas yang menjadi tempat untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak. Penanganan kasus perempuan dan anak di Kelompok Konstituen Walang Hatukau juga telah diakui oleh P2TP2A Kota Ambon.

Pengakuan inilah yang memperkuat akses Kelompok Konstituen Walang Hatukau terhadap Dana Desa di Negeri Batu Merah. Angka 30 juta rupiah adalah suatu jumlah yang kecil untuk penanganan kasus-kasus perempuan dan anak di Negeri Batu Merah. Apalagi, jika kasus-kasus tersebut harus melalui proses hukum yang panjang, yang biasanya menguras tenaga dan biaya yang tidak sedikit, baik untuk pendampingan korban maupun untuk pemulihan, dan sebagainya.

Namun, adanya alokasi Dana Desa tersebut, setidaknya menunjukkan adanya keberhasilan advokasi yang dilakukan dan pengakuan terhadap Kelompok Konstituen Walang Hatukau. Kelompok Konstituen mengusulkan kepada pemerintah negeri untuk mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan kasus perempuan dan anak. Karena pemerintah negeri telah mengetahui dan menyaksikan sendiri, upaya yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen Walang Hatukau, maka tidak perlu dipertanyakan. Apalagi kasus-kasus perempuan

dan anak tertentu yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan selalu melibatkan pemerintah negeri.

Pelibatan pemerintah negeri dalam penyelesaian kasus perempuan dan anak adalah strategi untuk mengenalkan program dan kegiatan kelompok konstituen, sekaligus memengaruhi pemerintah negeri. Strategi ini efektif, karena pemerintah negeri telah mempunyai data dan informasi yang cukup untuk mendukung kelompok konstituen.

Kelompok Konstituen Mele Maju

Cerita menarik juga datang dari Kelompok Konstituen Mele Maju yang berhasil mengadvokasi Dana Desa di Desa Kembang Kerang, untuk pengadaan mobil ambulans. Proses advokasi yang dilakukan kelompok konstituen tidak panjang, tidak berliku, dan juga tidak rumit. Itu karena, kelompok konstituen terlebih dahulu mendorong dan mendukung pemimpin yang peduli terhadap perempuan dan anak.

Yahya Putra adalah Ketua Kelompok Konstituen Mele Maju, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Yahya adalah satu dari sedikit laki-laki yang dipilih menjadi ketua kelompok konstituen ketika dibentuk. Sebelumnya Yahya adalah Kepala Dusun Kembang Kerang Lauk Daya.

Ketika menjadi Kepala Dusun, Yahya dikenal sangat dekat dan peduli terhadap warganya. Yahya membantu mengurus dan menyelesaikan berbagai masalah warganya. Karena itu, Yahya juga dipilih menjadi ketua kelompok konstituen. Dengan bergabung di kelompok konstituen, Yahya mempunyai kesempatan untuk belajar memahami berbagai permasalahan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai kepala dusun dan sebagai ketua kelompok konstituen, Yahya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak, dengan mengupayakan warganya dapat mengakses layanan pemerintah. Namun itu tidak mudah. Banyak warga yang tidak mengetahui program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Di samping itu, tidak mudah bagi warga, terutama perempuan dan anak mengakses layanan yang disediakan.

Untuk mengakses layanan kesehatan di tingkat kabupaten, apalagi di tingkat provinsi, maka biaya yang dibutuhkan sangat besar. Bersama kelompok konstituen, Yahya berusaha untuk menangani korban perempuan dan anak sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, dan layanan sosial yang disediakan oleh negara.

Dalam berbagai pertemuan terkait perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten, Yahya dan kelompok konstituen mengusulkan program

Mobil Ambulans yang dibeli dari Dana Desa (atas), Kegiatan memperkuat kelompok konstituen (kiri-bawah) dan Pelatihan Kelompok yg didanai Dana Desa (kanan-bawah) Foto : **Indira Falmayani/Yayasan BaKTI**

dan kegiatan yang diharapkan mengatasi masalah-masalah perempuan dan anak. Ketika pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa, Yahya dan kelompok konstituen mengusulkan adanya alokasi Dana Desa di Desa Kembang Kerang untuk penanganan masalah perempuan dan anak.

Pada Januari 2018 awal bagi Yahya mengemban tugas sebagai Kepala Desa Kembang Kerang. Hal yang pertama dilakukan Yahya adalah memberi kesempatan kepada perempuan terlibat dalam rapat-rapat strategis di desa, seperti musyarawah perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan anggaran.

Usulan-usulan terkait kebutuhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai menjadi prioritas penganggaran di Desa Kembang Kerang. Itulah yang memunculkan usulan pembelian ambulans. Mengapa ambulans dan untuk siapa? Tentu menjadi pertanyaan, terutama orang-orang yang tidak mengerti dan tidak pernah bersentuhan dengan pasien atau korban yang membutuhkan pelayanan segera di Puskesmas atau di Rumah Sakit.

Yahya mempunyai mempunyai pengalaman selama menjabat sebagai Kepala Dusun dan Ketua Kelompok Konstituen. Ketika ada warga yang sakit dan harus di bawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit, masalah yang dikeluhkan adalah alat dan biaya transportasi. Karena itu, bagi Yahya dan mereka yang pernah mengurusi orang-orang yang harus dirawat di Puskesmas dan Rumah Sakit, pengadaan mobil ambulans dengan menggunakan Dana Desa merupakan sesuatu yang mendesak. Usulan pengadaan mobil ambulans dengan Dana Desa pun disetujui dengan suara bulat. Bahkan warga sangat gembira dengan usulan tersebut. Sembilan bulan setelah menjabat sebagai Kepala Desa Kembang Kerang, Yahya mampu menyediakan ambulans di desanya yang digunakan secara gratis oleh warga yang membutuhkannya.

Dana Desa untuk Peningkatan Pendapatan

Kelompok Konstituen di Tana Toraja, Ambon, dan Lombok Timur secara aktif mengadvokasi Dana Desa untuk peningkatan pendapatan. Kelompok konstituen di Tana Toraja menyiapkan rancangan kegiatan dan anggaran yang dibantu oleh Yayasan Kombongan Situru (YKS), untuk diusulkan pada Musyawarah Lembang (Desa) dalam pembahasan Rencana Kerja Lembang. Pengurus dan anggota kelompok konstituen secara aktif berkomunikasi dengan Kepala Lembang dan

Perempuan terlibat aktif dalam musyawarah desa
Foto : **Siju Moriera/Yayasan BaKTI**

BPL (Badan Permusyawaratan Lembang) untuk meyakinkan dan menggalang dukungan. Komunikasi juga dilakukan dengan tokoh-tokoh agama dan organisasi-organisasi di masyarakat.

Ketika dilaksanakan Musyawarah Lembang, pengurus kelompok konstituen mendapat undangan untuk hadir, baik mewakili kelompok konstituen maupun sebagai tokoh masyarakat. Di musyawarah tersebut, pengurus kelompok konstituen meyakinkan kepada peserta musyawarah untuk menerima dan menyetujui usulan itu.

Usulan kelompok konstituen untuk peningkatan pendapatan angkanya tidak besar, rata-rata di kisaran Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Usulan kelompok konstituen juga disertai dengan rancangan kegiatan dan anggarannya. Ini merupakan strategi yang efektif untuk menyakinkan forum Musyawarah Lembang untuk menerima usulan tersebut.

Di Ambon dan Lombok Timur, upaya untuk memengaruhi alokasi Dana Desa telah dimulai dengan masuknya pengurus dan anggota kelompok konstituen menjadi pemimpin-pemimpin formal di masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan staf-staf di pemerintah desa.

Strategi ini efektif, karena keberadaan pengurus dan anggota kelompok konstituen di lembaga-lembaga formal pemerintah, memungkinkan mereka dapat mengusulkan dan mendukung usulan-usulan yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan keluarga, khususnya yang akan dikelola oleh perempuan, baik perorangan maupun kelompok.

Alokasi Dana Desa mulai ditujukan kepada pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, walaupun dalam jumlah yang kecil, setelah sebagian orang-orang yang terlibat dalam musyawarah desa, adalah mereka yang mempunyai pengetahuan dan perspektif mengenai perempuan.

INFORMASI LEBIH LANJUT
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program MAMPU BaKTI, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

Menuju Satu Data Penduduk Indonesia

Oleh **MUHAMMAD AMIR MA'RUF**

Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyediakan data statistik dasar. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Ada tiga jenis sensus yang wajib dilaksanakan oleh BPS, yaitu Sensus Pertanian pada setiap tahun yang berakhiran angka 3, Sensus Ekonomi pada setiap tahun yang berakhiran angka 6, dan Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran angka 0.

Penyelenggaraan sensus setiap sepuluh tahun ini bertujuan untuk memutakhirkan data dasar secara menyeluruh. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, BPS bertugas menyediakan data statistik dasar. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan sensus yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Sensus penduduk sudah enam kali diselenggarakan oleh BPS, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sedangkan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus penduduk ketujuh yang dilaksanakan oleh BPS. Meskipun begitu, persiapan sudah dilakukan sejak tahun 2017.

Pada tahun 2018, acara *Kick-off* SP2020 menandai "genderang perang" BPS untuk menghadapi SP2020. Tak tanggung-tanggung, BPS berencana mengerahkan satu juta petugas untuk perhelatan besar ini.

Pemerintah juga sepakat memberikan dukungan penuh melalui kucuran dana APBN yang diperkirakan sebesar 4,034 triliun rupiah untuk SP2020. Jumlah ini tentu digunakan untuk berbagai macam kebutuhan seperti honor petugas, biaya teknologi, hingga diseminasi.

Banyak Inovasi

Era industri 4.0 tak hanya memberikan efek pada dunia perdagangan dan produksi. Globalisasi yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi ini juga disadari oleh BPS. Tuntutan untuk menyediakan data yang cepat, mudah, dan akurat adalah harga mutlak.

Oleh karena itu, pelaksanaan SP2020 ini merupakan ajang kreativitas dari para ahli untuk mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Beberapa perubahan juga turut mewarnai SP2020 ini.

Jika biasanya banyak kementerian yang 'titip' data, kali ini BPS dan kementerian dan lembaga lain justru bahu membahu membangun sebuah fondasi untuk mewujudkan Satu Data Penduduk Indonesia. Harapannya, tidak ada lagi perbedaan data penduduk antara BPS dan kementerian atau lembaga lain.

Komitmen ini ditandai dengan berubahnya metode pendataan SP2020 dibanding SP pada periode sebelumnya. Pada SP2020, BPS menggunakan istilah *combine method*. Salah satu yang paling jelas terlihat dari metode ini adalah pemanfaatan data penduduk dari Dukcapil sebagai kerangka data dasar.

Jadi, data registrasi penduduk yang dimiliki oleh Kemendagri akan digunakan sebagai acuan petugas dalam melakukan pencacahan. Selain itu, pemanfaatan *Computer Asisted Web Interviewing* (CAWI) juga dilakukan pada SP2020. Hal ini dilakukan sebagai salah satu solusi dari kesulitan petugas untuk menemui responden.

Melalui metode CAWI, setiap orang dapat memperbaharui data pada web yang telah disediakan secara mandiri. Sehingga petugas tidak perlu datang hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan. Cara ini dinilai sesuai dengan

kondisi perkotaan dimana mayoritas penduduknya sibuk.

Untuk pendataan oleh petugas, BPS memanfaatkan teknologi *smartphone android* sebagai pengganti kertas dan pensil. Metode ini disebut *Computer Asisted Personal Interview* (CAPI). Cara ini dinilai mampu mengurangi biaya operasional seperti pencetakan dokumen maupun pengiriman dokumen.

Selain itu, CAPI juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi penggunaan kertas. Namun, BPS juga memperhatikan kondisi yang dialami masyarakat *remote area*. Penggunaan *Paperand Pencil Interview* (PAPI) atau pendataan konvensional dengan menggunakan kertas dan pensil juga masih dilakukan.

Akan tetapi, penggunaan variabel yang tidak terlalu banyak diyakini tidak akan menggunakan kertas sebanyak SP pada periode sebelumnya. Jika pada SP2010 terdapat lebih dari 40 variabel, pada SP2020 ini hanya menggali sekitar 8 variabel.

Tahapan Sp2020

Penggunaan *combined method* pada SP2020 juga berpengaruh pada perubahan tahapan pelaksanaan. Terdapat tujuh tahapan pada pelaksanaan SP2020. Tahap pertama adalah koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

Selain untuk mengeruk dukungan berbagai pihak, koordinasi juga dilakukan karena pada SP2020 ini menggunakan data registrasi penduduk sebagai data dasar. Tahap kedua yaitu penyiapan basis data dasar oleh BPS.

Data penduduk yang dimiliki oleh Kemendagri kemudian di *breakdown* sehingga membentuk suatu basis data penduduk menurut Satuan Lingkungan Setempat terkecil guna keperluan tahap selanjutnya.

Tahap ketiga adalah pemutakhiran mandiri melalui CAWI yang akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2020. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan untuk memutakhirkan data melalui *website* yang telah disediakan. Pemutakhiran mandiri ini dilakukan tiga putaran dan akan dipantau perkembangannya.

Besar kecilnya respon masyarakat terhadap pemutakhiran mandiri menjadi sangat penting. Semakin banyak masyarakat yang melakukan pemutakhiran mandiri, maka beban petugas akan semakin ringan.

Untuk memaksimalkan tahap ini, BPS telah menyiapkan server khusus agar mampu menampung banyaknya data yang masuk. Sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPS juga menekankan pentingnya tahapan ini.

Setelah pemutakhiran mandiri, tahap selanjutnya yaitu penyusunan Daftar Penduduk yang merupakan data hasil pemutakhiran mandiri. Output yang dihasilkan adalah basis data penduduk menurut Satuan Lingkungan Setempat

Daftar Penduduk disiapkan untuk keperluan pencacahan langsung oleh petugas. Tahap kelima adalah pemeriksaan Daftar Penduduk oleh petugas bersama pengurus Satuan Lingkungan Setempat. Pada tahapan ini, petugas mengonfirmasi keberadaan penduduk kepada ketua RT atau pengurus Satuan Lingkungan Setempat. Hasil dari tahapan ini yaitu daftar penduduk yang berdomisili dan bertempat tinggal tetap pada Satuan Lingkungan Setempat tersebut.

Tahap keenam yaitu *Groundcheck* atau pemeriksaan lapangan oleh petugas SP2020 bersama pengurus Satuan Lingkungan Setempat. Hal ini dilakukan dari rumah ke rumah guna memastikan seluruh daftar penduduk yang dikonfirmasi oleh pengurus Satuan Lingkungan Setempat benar-benar ditemukan. Tahap ketujuh merupakan kegiatan pencacahan *door to door* bagi penduduk yang tidak melakukan pemutakhiran mandiri dan tidak tercakup pada Data Penduduk.

Perlu Dukungan Banyak Pihak

Mengingat besarnya sumber daya yang digunakan pada SP2020 ini, baik anggaran dan tenaga, dukungan banyak pihak sangat dibutuhkan untuk kesuksesan SP2020. Bentuk dukungan masyarakat pada hajatan besar ini dapat berupa kontribusi untuk pemutakhiran mandiri berbasis CAWI.

Jika CAWI mendapat respon positif dari masyarakat, *release* Satu Data Penduduk Indonesia oleh BPS dan Kemendagri pada Desember 2020 dapat menghasilkan data yang akurat. Mari, sukseskan SP2020. Dengan data, kita bangun negara.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari Geotimes dan dapat dibaca pada link berikut: **https://geotimes.co.id/opini/menuju-satu-data-penduduk-indonesia/**

7 September 2019

FESTIVAL KALA MONOLOG 11

Festival Kala Monolog kembali digelar di Makassar. Festival yang dicetuskan di tahun 2009 oleh Kala Teater merupakan event teater tahunan kota Makassar. Festival Kala Monolog digagas oleh Kala Teater merupakan organisasi nirlaba yang bergerak di bidang seni budaya. Festival ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas aktor-aktor teater dan memetakan kehadiran aktor-aktor khususnya di Makassar. Selain kompetisi monolog, Festival Kala Monolog 11 juga menyelenggarakan serangkaian workshop, pelatihan dan diskusi. Salah satunya adalah Belajar Bercerita bersama Luna Vidya yang digelar di Kantor BaKTI. Workshop ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang cara bercerita dengan jujur agar didengarkan baik, juga cara mengaitkan perasaan dan pengalaman serta membangun ketertarikan dalam bercerita.

Pembicara yang diundang sangat berkompeten dalam bidang ini yaitu Luna Vidya, seorang monologer, penulis serta banyak mengisi pelatihan-pelatihan *public speaking*. Kemampuan bercerita dipercaya sangat penting untuk segala profesi. Tidak hanya dalam bidang teater atau monolog, tetapi profesi yang membutuhkan keahlian berbicara di depan umum, seperti guru, dosen dan banyak profesi lainnya. Materi yang disampaikan sangatlah mewakili kebutuhan keterampilan berbicara, seperti memahami deskripsi, bagian-bagian dari deskripsi, narasi, dan perbedaan dari deskripsi dan narasi. Selain pemaparan materi, workshop ini tentunya juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan materi yang telah diterima. Sehingga peserta bisa merasakan langsung dampak dari materi yang diberikan. Selain pegiat teater, workshop ini diikuti oleh mahasiswa, guru dan dosen.

25 September 2019

Pertemuan Lintas Sektor Pemanfaatan Data SIAK di Kabupaten Gowa

Pencapaian cakupan akta kelahiran 98% (melewati target 85% RPJMN 2015-2019) dan perekaman E-KTP 99% per November 2018 di Kabupaten Gowa sangat penting ditindaklanjuti untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak dengan memanfaatkan data profil kependudukan yang terekam melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Langkah strategis pemanfaatan data profil kependudukan tersebut, khususnya berkaitan dengan situasi anak usia 0-18 tahun didasarkan pada analisis data agregat untuk menemukan makna data. Selanjutnya dijadikan sebagai referensi kebijakan dan perencanaan pembangunan perlindungan dan layanan anak. UNICEF melalui Yayasan BaKTI bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gowa, melalui Dinas Dukcapil melaksanakan Pertemuan Lintas Sektor Pemanfaatan Data SIAK sebagai Sumber Statistik Hayati untuk Pembangunan Perlindungan dan Pelayanan Anak, bertempat di Kantor Yayasan BaKTI. Sebelumnya, dilakukan kegiatan ekstrak dan analisis data profil kependudukan yang hasilnya menjadi materi dalam pertemuan ini. Sebanyak 15 orang hadir dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gowa terkait yakni Dukcapil, Dinkes, Diknas, DP3A, PMD, Dinsos, PP-KB, RSU daerah, Bappeda, dan LPA Gowa. Hadir sebagai naramsuber, Kepala BAPPEDA Kab. Gowa dan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Gowa, Bapak Ambo, SH. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah workshop perumusan progam penyelesaian masalah anak lintas sektor yang akan difasilitasi dan dibiayai oleh Bappeda Gowa.

Genesis

PENULIS **Ratih Kumala**

Pawestri tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Saat berusia 19 tahun, ia jatuh cinta kepada seorang lelaki. Lelaki inilah yang akan menjadi sumber malapetaka bagi kehidupannya. Namun, karena malapetaka itu pulalah ia menemukan jalan dengan mengabdikan diri sebagai seorang biarawati. Namun, konflik batin pun terjadi pada dirinya setelah menyaksikan peristiwa mengerikan di Ambon. Novel ini sarat akan filosofi dan psikologi, membuat kita mempertanyakan kembali eksistensi diri.

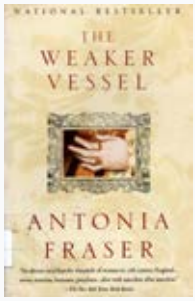

The Weaker Vessel

PENULIS **Antonia Fraser**

Seberapa lemahkah para wanita di era Perang Saudara? Apa yang bisa mereka harapkan di luar pernikahan dan persalinan di usia di mana kematian bayi dan ibu sering terjadi dan kontrasepsi tidak diketahui? Adakah yang menikah karena cinta? Bisakah seorang wanita bercerai? Hak apa yang dimiliki orang yang belum menikah? Apa harapan para janda? Seorang ahli pada periode itu, Antonia Fraser, menghidupkan banyak dan berbagai wanita yang telah dia temui dalam penelitiannya yang cukup besar: pengasuh, pemerah susu, istri, ikan, biarawati, pembela istana, countesses, penyihir dan janda.

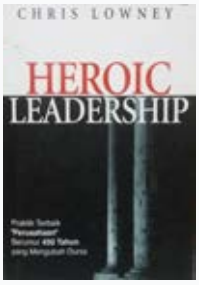

Heroic Leadership

PENULIS **Chris Lowney**

Para pemimpin membuat perusahaan-perusahaan menjadi besar dan unggul, tapi sedikit dari kita yang tahu bagaimana mengubah diri kita dan orang lain menjadi pemimpin yang hebat. Satu "perusahaan", Yesuit, memulai formula unik untuk membentuk para pemimpin. Dalam proses itu, para Yesuit membangun salah satu "perusahaan" paling berhasil dalam sejarah. Sejak didirikan pada tahun 1540 oleh sepuluh pria tanpa modal dan tanpa rencana bisnis, Serikat Yesuit telah menjadi sumber penemuan, inovasi, dan inspirasi bagi banyak pihak. Dalam karya yang luar biasa ini, Chris Lowney, seorang mantan Yesuit dan eksekutif J.P Morgan, mengungkapkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah menuntun para Yesuit selama 450 tahun.

Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo

PENULIS **Heru Prasetia**

Dibanding peristiwa lain, bencana adalah yang paling tajam dalam mengungkapkan struktur sosial dan budaya masyarakat kita. Bencana memberi peluang untuk mengamati aspek-aspek dalam proses dan struktur sosial yang lebih luas, tidak tampak dan tersembunyi dalam keseharian. Karena itu, mengamati lumpur Lapindo akan membuka jalan bagi pemahaman kita atas struktur sosial yang lebih luas. Buku ini hadir untuk menelaah berbagai aspek lumpur Lapindo yang dapat memberi kita pemahaman baru mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sosial kita sebagai warga negara.

Buku-buku tersebut diatas dapat dibaca di Perpustakaan Yayasan BaKTI.
Jika anda memiliki buku atau publikasi lainnya yang ingin dipublikasikan silahkan menghubungi kami di Yayasan BaKTI.